



**KEPUTUSAN SHINZO ABE MENGADAKAN PEMILIHAN UMUM
LEBIH AWAL TAHUN 2017**

SHINZO ABE'S DECISION HOLD AN EARLY ELECTION IN 2017

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Januar Tri Raharjo
140910101049**

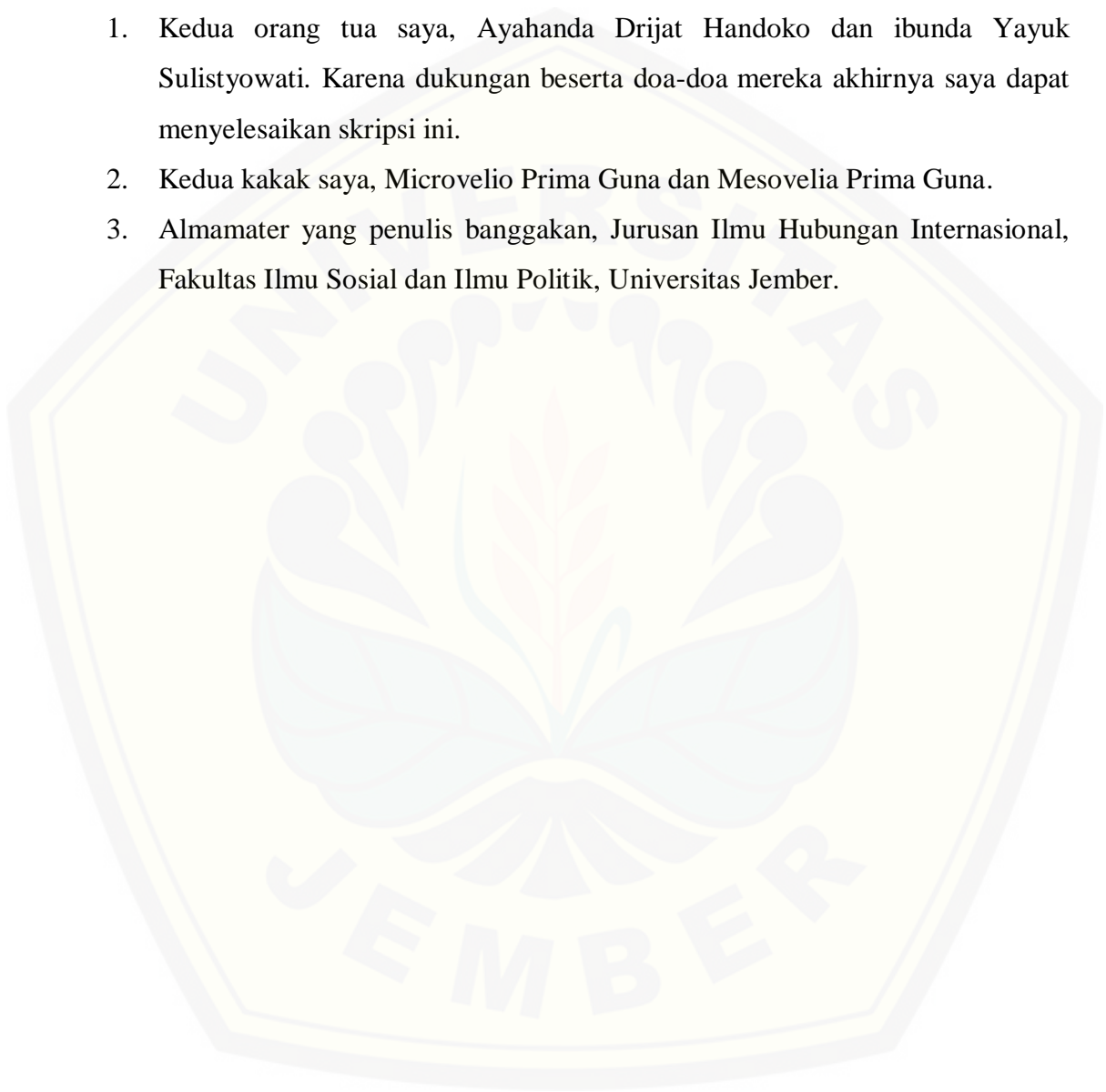
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

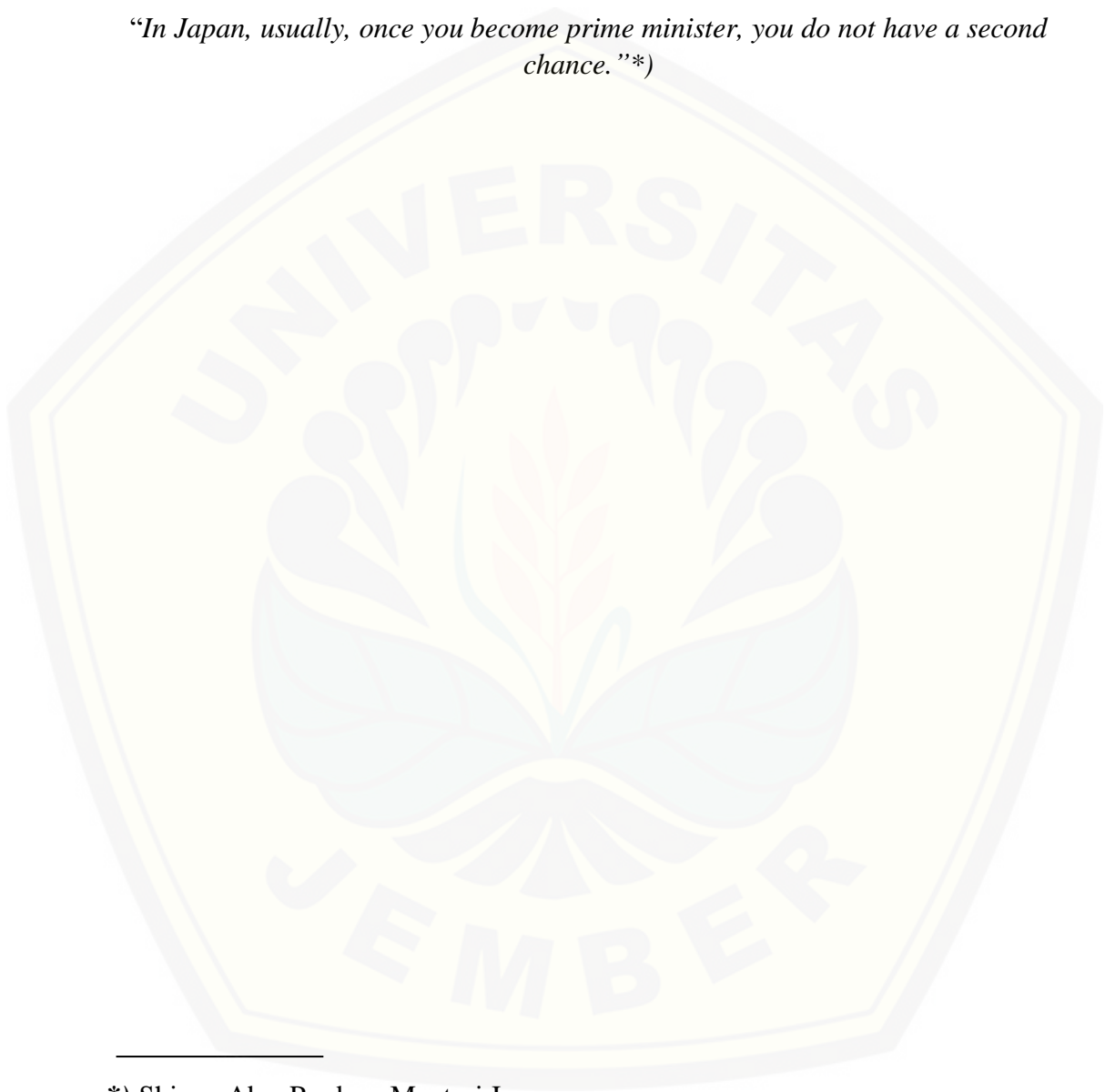
Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Drijat Handoko dan ibunda Yayuk Sulistyowati. Karena dukungan beserta doa-doa mereka akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua kakak saya, Microvelio Prima Guna dan Mesovelio Prima Guna.
3. Almamater yang penulis banggakan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



MOTO

“In Japan, usually, once you become prime minister, you do not have a second chance.”)*



*) Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Januar Tri Raharjo

NIM : 140910101049

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Shinzo Abe Mengadakan Pemilihan Umum Lebih Awal Tahun 2017” merupakan hasil karya sendiri, menggunakan kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari karya ilmiah ini dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bukti dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2019
Yang menyatakan

Januar Tri Raharjo
NIM 140910101049

SKRIPSI

**KEPUTUSAN SHINZO ABE MENGADAKAN PEMILIHAN UMUM
LEBIH AWAL TAHUN 2017**

SHINZO ABE'S DECISION HOLD AN EARLY ELECTION IN 2017

SKRIPSI

Oleh:

Januar Tri Raharjo

NIM: 140910101049

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agung Purwanto, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supriyadi, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan Shinzo Abe Mengadakan Pemilihan Umum Lebih Awal Tahun 2017” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Januari 2019

Tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D.
NIP.196402081989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Agung Purwanto, M.Si.
NIP 196810221993031002

Drs. Supriyadi, M.Si.
NIP 195803171985031003

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si
NIP 197212041999031004

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.
NIP 195904231987021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si.
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

KEPUTUSAN SHINZO ABE MENGADAKAN PEMILIHAN UMUM LEBIH AWAL TAHUN 2017; Januar Tri Raharjo; 140910101049; 84 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemilihan umum yang diselenggarakan lebih awal dari jadwal pemilihan yang seharusnya bukanlah hal baru bagi masyarakat Jepang. Semenjak Shinzo Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang untuk kedua kalinya pada tahun 2012, Abe telah melaksanakan pemilihan cepat sebanyak dua kali. Pertama pada tahun 2014 kemudian di tahun 2017. Kembalinya Abe sebagai Perdana Menteri pada tahun 2012 dengan membawa paket kebijakan yang diberi nama *Abenomic* ternyata tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyaknya tekanan dari pihak oposisi membuat Abe membubarkan parlemen untuk melaksanakan pemilihan umum dua tahun lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Kemenangan Abe dalam pemilihan umum di tahun 2014 memperpanjang masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang hingga tahun 2018.

Pada tahun 2017, keterlibatan Abe dalam sebuah skandal ditambah keterlibatan beberapa menteri dalam kabinetnya membuat elektabilitas Abe menurun. Elektabilitas Abe berada pada titik terendah selama dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 2012. Turunnya elektabilitas Abe berdampak pada kalahnya LDP dalam pemilihan Gubernur di Tokyo pada tahun 2017. Tidak ingin mengulangi kekalahan yang pernah dirasakan pada tahun 2009, Abe merombak kabinetnya. *Reshuffle* yang dilakukan Abe bekerja dengan baik dengan naiknya kembali elektabilitasnya.

Pada saat yang bersamaan, Jepang yang mengalami krisis keamanan akibat memanasnya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan, Abe memutuskan untuk melakukan pemilihan umum setahun lebih awal. Keputusan Abe untuk membubarkan *Diet* dan mengadakan pemilihan umum menuai banyak protes dan

kritik terutama dari pihak oposisi. Keputusan membubarkan pemerintahan ditengah krisis keamanan yang sedang dihadapi Jepang menyebabkan terjadinya kekosongan politik. Pada tanggal 28 September 2017 secara resmi Abe membubarkan parlemen untuk mengadakan pemilihan umum pada tanggal 22 Oktober 2017.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam alasan yang membuat Abememutuskan melaksanakan pemilihan umum lebih awal ditengah krisis keamanan yang sedang dihadapi Jepang. Penulis menggunakan data sekunder yang dianggap relevan dalam penyusunan penelitian ini sehinggayang akan tertulis dalam peneltian ini akan lebih bersifat observasi data-data yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal di tahun 2017. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi literatur (*library research*). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Keputusan Abe untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal adalah adanya peluang untuk menang dalam pemilihan umum jika dilaksanakan lebih awal. Abe memanfaatkan momentum pada saat elektabilitasnya sedang naik, dan masyarakat sedang khawatir terhadap krisis keamanan yang dialami, Abe menawarkan jaminan keamanan. Selain itu, Abe juga melihat kondisi partai oposisi yang tengah mengalami perpecahan. Abe memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal, sehingga partai oposisi tidak memiliki kesempatan untuk membangun kekuatan yang dapat berpotensi mengalahkan dirinya.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat-Nya penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Shinzo Abe Mengadakan Pemilihan Umum Lebih Awal Tahun 2017”. Skripsi ini disusun penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Drs. Agung Purwanto, M.Si. selaku dosen pembimbing utama dan Drs. Supriyadi, M.Si. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar MNMA: Yery Bagus Iman, Adhytia Pahlawan, Ganda Atmaja, Pranata Dwi Kusuma, Moh. Andi Saputra, Nur Ardi Setiawan, Bertha Vique Lorentya, terima kasih telah berbagi kebahagiaan dan menjadi ruang untuk berkeluh kesah tentang permasalahan skripsi yang dihadapi.
4. Rekan-rekan secangkir kopi: FU, Towi, Bayu, Aad, Ryan, Dewi, Asti, Epok, Rekka.
5. Keluarga HI UNEJ Angkatan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
6. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup pembahasan.....	4
1.2.1. Batasan Materi.....	4
1.2.2. Batasan Waktu.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Landasan Konseptual.....	5
1.6. Argumen Utama.....	8
1.7. Metodologi Penelitian.....	8
1.7.1. Metode Pengumpulan Data.....	9
1.7.2. Teknik Analisis Data.....	9
1.8. Sistematika Penulisan.....	9

BAB 2. PARTAI POLITIK DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DI JEPANG	12
2.1.Sistem Pemeritahan Parlemerter dan Presidensil	12
2.1.1 Sistem Pemerintahan Parlemerter	12
2.1.2 Sistem Pemerintahan Presidensil	14
2.2. Partai Politik di Jepang	16
2.3. Lembaga Legislatif	21
2.3.1 Majelis Rendah (<i>House of Representative</i>)	23
2.3.2 Majelis Tinggi (<i>House of Councillors</i>)	24
2.4. Lembaga Eksekutif	25
2.4.1. Kabinet	25
2.4.2. Perdana Menteri	25
2.4.3. Menteri	28
2.5.Lembaga Yudikatif	28
2.6. Pemerintahan Lokal	31
BAB 3. PEMERINTAHAN ABE PERIODE KE 2 TAHUN 2012-2017	33
3.1. Dinamika Politik Jepang Tahun 2012-2014	34
3.1.1. Kebijakan <i>Abenomics</i>	34
3.1.2. Pemilu Majelis Tinggi tahun 2013	35
3.1.3. Skandal dalam kabinet Abe	36
3.1.4. Keputusan Abe mengadakan pemilihan umum tahun 2014	37
3.2. Dinamika Politik Jepang Tahun 2014-2017	38
3.2.1. Partai oposisi pasca pemilihan umum Majelis Rendah 2014	38
3.2.2. Pemilihan umum majelis Tinggi tahun 2016	40
3.2.3. Pemilihan Gubernur Tokyo	41
3.2.4. Pemilihan ketua partai LDP	42
3.2.5. Krisis keamanan di Jepang	43

3.3. Elektabilitas Abe Tahun 2014-2017.....	44
3.4 <i>Reshuffle</i> Kabinet Tahun 2014-2017.....	46
BAB 4. KEPUTUSAN SHINZO ABE MENGADAKAN PEMILIHAN UMUM LEBIH AWL TAHUN 2017.....	50
4.1 Melemahnya Kekuatan Partai Oposisi.....	50
4.2 Elektabilitas Abe.....	52
4.2.1 Turunnya Elektabilitas Abe.....	55
4.2.2 Naiknya Elektabilitas Abe.....	61
4.3 Politik Abe Memanfaatkan Korea Utara.....	67
BAB 5. KESIMPULAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

- 2.1: Bagan pembagian tiga cabang pemerintahan berdasarkan konstitusi Jepang
- 2.2: Bagan sistem pemerintahan Jepang
- 2.3: Bagan sistem pemerintahan berdasarkan tingkatan
- 3.1: Bagan partai oposisi Jepang tahun 2014-2017
- 3.1: Grafik elektabilitas kabinet Abe dari tahun 2012-2017
- 4.1: Grafik elektabilitas Abe tahun 2017

DAFTAR TABEL

2.1: Tabel Perdana Menteri Jepang dari tahun 2000-2012



DAFTAR SINGKATAN

CDP : *Constitutional Democratic Party*

CGP : *Clean Government Party*

DP : *Democratic Party*

DPJ : *Democratic Party of Japan*

ICBMs: *Intercontinental Ballistic Missiles*

JCP : *Japan Communist Party*

LDP : *Liberal Democratic Party*

SDF : *Self Defense Force*

TPP : *Trans Pacific Partnership*



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu merupakan cerminan dari negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Pemilu penting dilaksanakan untuk mewujudkan demokrasi sebuah negara, dimana pemimpin yang terpilih merupakan hasil dari suara mayoritas terbanyak. Pergantian kekuasaan di negara-negara demokrasi berlangsung secara rutin dan terjadwal. Namun, tidak menutup kemungkinan pergantian kekuasaan di negara demokrasi berlangsung diluar jadwal yang seharusnya. Di negara-negara yang menganut demokrasi, pemilu dapat diselenggarakan lebih awal apabila terjadi krisis politik dalam negeri atau pemimpin sebuah negara diturunkan dari jabatannya secara paksa.

Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang menjunjung tinggi demokrasi, pergantian kekuasaan dilakukan melalui proses pemilu. Pemilu di Jepang terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, pemilu Majelis Rendah yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Kedua, pemilu Majelis Tinggi yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Ketiga, pemilu lokal untuk kantor di prefektur¹ yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali.

Perdana Menteri di Jepang bertugas sebagai kepala pemerintahan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh parlemen. Pemilu di Jepang pada tanggal 22 Oktober 2017 merupakan pemilu yang diadakan setahun lebih cepat dari jadwal yang semestinya diselenggarakan pada akhir 2018 (Japan Times 2017). Awal mula diselenggarakan percepatan pemilihan umum 2017 di Jepang ini berasal dari pernyataan Abe² yang mengatakan “*It is my mission as prime minister to exert strong leadership abilities*”(Japan Times, 2017).

¹ Prefektur merupakan wilayah bagian dalam suatu negara di Jepang. Di Indonesia dikenal dengan sebutan Provinsi.

²Dalam karya tulis ini penulis akan menggunakan kata Abe yang merujuk pada Shinzo Abe

Kembalinya Abe menjadi Perdana Menteri di tahun 2012, ia datang dengan sebuah kebijakan yang diberi nama *Abenomic*³. Rupanya kebijakan *Abenomic* tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan pemerintah yang memandang pesimis terhadap kebijakan tersebut (Katsuyuki, 2014). Jika kebijakan Abe tidak menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Jepang, bukan tidak mungkin dukungan untuk Abe dan LDP akan hilang. Banyaknya tekanan yang dirasakan oleh Abe, mulai dari masyarakat hingga tokoh politik lainnya memaksa Abe untuk mengadakan pemilu lebih awal dari jadwal yang seharusnya dilaksanakan (Fackler dan Hough, 2014). Pemilu yang diselenggarakan pada Desember 2014 merupakan referendum atas reformasi kebijakan *Abenomic* yang dinilai sulit diterapkan dan kurang populer bagi masyarakat Jepang (Lorenzo, 2015).

Setelah Abe menjabat kembali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014, menteri-menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Abe mengalami skandal korupsi dan nepotisme (Japan Times, 2017). Skandal korupsi yang terjadi dalam kabinet Abe berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Abe. Namun, elektabilitas dari Kabinet yang dipimpin oleh Abe mengalami kenaikan setelah Abe merombak kabinetnya. Abe menggantikan posisi menteri-menterinya yang terindikasi terlibat dalam skandal korupsi dan nepotisme (Nagy, 2017).

Memasnya kawasan Semenanjung Korea berdampak terhadap keamanan Jepang. Korea Utara telah meluncurkan rudal balistiknya yang mengarah ke Jepang sebanyak dua kali. Rudal pertama yang diluncurkan jatuh di perairan Jepang dan memicu sirine keamanan di Jepang. Rudal kedua yang diluncurkan oleh Korea Utara melintasi langit Jepang dan jatuh di perairan Jepang menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Ditengah krisis keamanan yang sedang dirasakan oleh masyarakat, Abe menawarkan jaminan keamanan bagi masyarakat Jepang. Dalam stasiun Tv Jepang, Abe mengatakan, "*We will protect our country under stable politics*" (Tribune 2017). Pernyataan tersebut merupakan sebuah janji

³Abenomic merupakan paket kebijakan yang dirancang oleh Abe untuk memperbaiki kondisi perekonomian Jepang.

Abe untuk melindungi negaranya dari ancaman negara lain yang mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Pada 28 September 2017 secara resmi Abe membubarkan parlemen untuk melancarkan pemilu (Yoshida, 2017). Pada 22 Oktober 2017 pemilu diselenggarakan. Pemilu kedua yang dipercepat oleh Abe di masa pemerintahannya merupakan sebuah pertaruhan besar untuk tetap bertahan sebagai Perdana Menteri atau harus tergantikan. Belum pernah ada sejarah Perdana Menteri Jepang yang mengadakan pemilu lebih cepat sebanyak dua kali dalam masa pemerintahannya. Abe merupakan satu-satunya Perdana Menteri Jepang yang telah mengadakan pemilu lebih awal sebanyak dua kali dalam masa kepemimpinannya.

Satu tahun masa jabatan Abe yang tersisa dimanfaatkan dengan mengadakan pemilihan umum lebih awal. Keputusan Abe tersebut bisa saja merupakan hal yang merugikan bagi dirinya karena akan mempersingkat masa jabatannya. Seorang pemimpin biasanya akan menghabiskan masa jabatannya terlebih dahulu kemudian bersaing dalam pemilihan selanjutnya untuk memperpanjang masa jabatannya. Tetapi, keberhasilan Abe memenangkan pemilihan umum pada tahun 2014 memperpanjang masa jabatannya sebagai Perdana Menteri hingga tahun 2018. Melihat Abe yang pernah mengadakan pemilihan umum lebih awal pada tahun 2014 dan mengadakan pemilihan umum lebih awal lagi pada tahun 2017 bisa jadi hal tersebut akan membentuk sebuah pola politik tersendiri bagi Abe. Penulis juga tertarik untuk meneliti ini karena sosok Shinzo Abe yang berhasil menyelenggarakan pemilihan umum lebih awal sebanyak dua kali dalam kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Jepang.

Penelitian sebelumnya telah membahas alasan-alasan percepatan pemilihan umum yang dilakukan Abe pada tahun 2014. Hasilnya adalah karena referendum atas kebijakan-kebijakan Abe (Mochizuki & Porter, 2013). Namun penulis tertarik untuk meneliti kembali percepatan pemilu di Jepang yang diinisiasi oleh Abe pada Oktober 2017. Penulis mengadaptasi teori pilihan rasional dalam menganalisis percepatan pemilihan umum Jepang tahun 2017

untuk meneliti lebih dalam lagi adanya alasan-alasan yang melatar belakangi Abe mengadakan pemilihan umum lebih awal dari jadwal seharusnya.

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis meneliti lebih dalam lagi alasan Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal di tahun 2017 kedalam skripsi yang berjudul **“Keputusan Shinzo Abe Mengadakan Pemilu Lebih Awal Tahun 2017”**.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah agar pembahasan suatu fenomena tidak keluar dan meluas dari fokus utama penelitian, dan agar dapat menjadi sebuah karya tulis yang sistematis dan terarah. Perlunya mengarahkan pembahasan agar sesuai dengan pokok permasalahan fenomena yang terjadi serta agar dapat mempermudah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini ruang lingkup pembahasan terbagi menjadi dua, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk menentukan fokus atau materi yang akan dijadikan pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini, batasan materi yang digunakan adalah alasan Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal di tahun 2017.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah sebagai acuan dimulainya penelitian terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Tahun 2012 dipilih karena Shinzo Abe terpilih menjadi Perdana Menteri setelah menang dalam pemilu. Sedangkan 2017 dipilih karena Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal, tepatnya tanggal 22 Oktober 2017.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **“Mengapa Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal di tahun 2017?”**

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu terdapat tujuan yang berguna untuk menyajikan ilmu pengetahuan baru. Penulis berusaha untuk menyajikan analisa dari rangkaian fenomena internasional untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis berusaha untuk meneliti alasan Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal di tahun 2017.

1.5. Landasan Konseptual

Dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, kerangka konseptual diperlukan guna memperjelas serta mempertajam pembahasan suatu fenomena atau kejadian. Kerangka konseptual dapat juga menuntun dalam pencarian fakta yang kemudian dapat digunakan dalam merumuskan arumen utama dalam sebuah penelitian. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan konsep pilihan rasional atau *rational choice* untuk menemukan jawaban terkait keputusan Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal tahun 2017. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, pilihan rasional digunakan untuk menganalisa maksud dan tujuan sebuah negara, dan mempertimbangkan semua pilihan yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal.

Konsep pilihan rasional atau *rational choice* mengasumsikan rasionalitas sebagai suatu pilihan yang diambil berdasarkan kalkulasi untung dan rugi (*cost and benefit calculation*) bukan pada pertimbangan moralitas baik atau buruk bagaimana seorang aktor memutuskan sebuah kebijakan dengan memperhitungkan secara rasional (Walt, 1999). Dalam memutuskan sebuah kebijakan apa yang akan diambil oleh aktor, konsep pilihan rasional berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai pilihan terbaik bagi para pembuat keputusan (*decision maker*).

Berdasarkan konstitusi Jepang (Pasal 73), urusan luar negeri ditangani oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri bertanggung jawab untuk melaporkan hubungan luar negeri kepada *Diet*⁴. Meskipun terdapat menteri luar negeri yang mengepalai kementerian luar negeri, namun Perdana Menteri yang mengarahkan seluruh pembuatan kebijakan luar negeri. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perdana Menteri merupakan aktor utama dalam pembuat keputusan kebijakan. Penulis menganalisa alasan Abe mengadakan pemilu lebih awal, melalui pernyataan, sikap, atau persepsi Abe selaku Perdana Menteri beserta pemerintahannya sebagai pembuat keputusan tersebut.

Dalam karyanya, Stephen M. Waltz (Walt, 1999) menjelaskan pilihan rasional terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:

1. *Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product of individual choices (or the product of choices made by unitary actors).*
2. *Rational choice theory is assumes that each actor seeks to maximize its "subjective expected utility". Given a particular set of preferences and a fixed array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefit.*
3. *The specification of actors' preferences is subject to certain constraints: (a) an actor's preferences must be complete (meaning we can rank order their preference for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to B and B to C, then A is preferred to C)*

Dalam penjelasan tersebut, terdapat tiga poin yang ingin dijelaskan oleh Waltz mengenai pilihan rasional. Pertama, pilihan rasional bersifat individu, yaitu hasil-hasil sosialisasi dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan). Waltz menambahkan aktor kesatuan (negara) pada aktor pilihan rasional. Kedua, Waltz

⁴*Diet* merupakan Lembaga Legislatif Jepang dan lembaga tertinggi dari kekuasaan negara, dan satu-satunya lembaga pembuat Undang-undang dari negara. Diet terdiri dari dua kamar yaitu Majelis Rendah (*House of Representative*) dengan jumlah 480 kursi dan Majelis Tinggi (*House of Council*) dengan jumlah 242 kursi.

berasumsi bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya, hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya. Ketiga, pilihan rasional memfokuskan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu, misalnya aktor memiliki beberapa pilihan. Pada intinya, Waltz menyatakan bahwa pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana individu atas nama pemerintah membuat keputusan.

Kegagalan LDP dalam pemilihan Gubernur Tokyo bulan Juli 2017 menjadi pertimbangan tersendiri bagi Shinzo Abe untuk bisa mempertahankan kekuasaannya sebagai Perdana Menteri dan kekuasaan LDP di parlemen jika pemilu diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang semestinya pada tahun 2018. Berdasarkan hasil survey harian surat kabar *Yomiuri*, elektabilitas Shinzo Abe berada di posisi terendah di angka 36 persen. *Reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Shinzo Abe membawa angin segar dengan meningkatnya elektabilitas Shinzo Abe ke angka 50 persen di bulan Agustus (ASIA PACIFIC FOUNDATION OF CANADA, 2017).

Jepang merupakan negara yang tidak memiliki kekuatan militer setangguh negara-negara Asia Timur lainnya seperti China, Korea Utara, dan Korea Selatan. Uji coba roket jarak jauh yang diluncurkan Korea Utara bulan Agustus lalu melintasi langit Hokaido dan jatuh di perairan Jepang membuat masyarakat Jepang semakin khawatir atas krisis keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea (Sang Hun & E.Sanger David, 2017). Masyarakat Jepang masih memiliki trauma atas kejadian bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada perang dunia ke II yang membuat Jepang hancur lebur. Melintasnya rudal balistik Korea Utara di langit Jepang, membuat khawatir masyarakat Jepang akan stabilitas keamanan negaranya. Sebagai sekutu Amerika, Jepang menggantungkan kekuatan militernya kepada Amerika. Ditengah memanasnya kawasan Semenanjung Korea, Abe mengatakan, *“Stepping up all possible pressure, we need to create a situation in which North Korea wants talks as it will change policy.”* (Tribune, 2017).

Dalam pernyataan tersebut, Abe menyatakan bahwa pentingnya sikap tegas dari Jepang dalam menghadapi tekanan stabilitas keamanan dalam negeri

yang mendapatkan ancaman dari Korea Utara. Abe menawarkan jaminan keamanan bagi masyarakat Jepang dengan berencana untuk merevisi konstitusi Jepang. Revisi konstitusi yang akan dilakukan oleh Abe memungkinkan Jepang untuk memiliki kekuatan militer, sehingga tidak bergantung kepada Amerika saat Jepang mendapatkan ancaman dari negara lain.

Meningkatnya elektabilitas kabinet yang dipimpin Abe dimanfaatkan untuk mengadakan pemilu lebih awal. Transisi pergantian kepemimpinan partai oposisi DPJ (*Democratic Party of Japan*) yang memperoleh dukungan rendah dari masyarakat menjadi pukulan tersendiri bagi DPJ yang akan menghadapi pemilu. Begitu juga dengan Kibo No Party (*Party of Hope*) yang dipimpin oleh Koike. Sebagai partai baru, partai pemenang pemilu di Tokyo tersebut bahkan belum memiliki persiapan yang cukup matang untuk melawan LDP dan koalisinya.

Melihat situasi perpolitikan yang terjadi di Jepang, Abe memutuskan untuk mengadakan pemilu lebih awal dari jadwal pemilu yang seharusnya. Pemilu yang diselenggarakan ditengah krisis keamanan yang dihadapi Jepang merupakan sebuah pertaruhan yang besar bagi Abe untuk tetap terus bertahan sebagai Perdana Menteri atau harus tergantikan. Naiknya elektabilitas kabinet Abe dan melemahnya pihak oposisi merupakan sebuah keuntungan bagi Abe untuk melaksanakan pemilu lebih awal. Sebagai ketua partai LDP, Abe berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya seperti pemilu di tahun 2009 saat LDP mengalami kekalahan pertamanya setelah lebih dari lima dekade berkuasa.

1.6. Argumen Utama

Tujuan dari Abe mempercepat pemilu adalah karena adanya aturan yang memungkinkan seorang Perdana Menteri untuk mempercepat pemilihan umum sesuai dengan konstitusi Jepang 1946 pasal 7 (pada halaman lampiran). Dengan diadakannya pemilihan umum lebih awal, terdapat kemungkinan besar Abe untuk memenangkan pemilihan jika diselenggarakan lebih awal dari jadwal yang seharusnya.

1.7. Metode Penelitian

Dalam bahasa Yunani, metodologi berasal dari dua suku kata yaitu *methodos* yang berarti cara, metode dan *logos* yang berarti pola pikir, cara pandang, struktur pengetahuan, nalar, dan kata. Sedangkan penelitian menurut Ranjit Kumar adalah sebuah penelusuran yang intensif dan terarah untuk memperoleh jawaban mengenai suatu fenomena sosial dan fisik. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan guna membangun suatu fakta, teori, prinsip atau aplikasi dari fakta, prinsip dan teori tersebut (Ranjit, 2011). Sehingga metodologi penelitian dapat diasumsikan sebagai suatu cara untuk memecahkan permasalahan dengan sistematis. Metodologi penelitian dapat juga diartikan sebagai tahapan-tahapan yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji suatu fenomena menggunakan logika yang ada di balik langkah-langkah tersebut (Ranjit, 2011). Oleh karena itu, metodologi penelitian yang akan digunakan terbagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Metode ini adalah sebuah metode yang tidak mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan mencari data, tetapi cukup merujuk pada data-data yang telah ada dari hasil penelitian yang dianggap relevan terhadap suatu fenomena atau isu yang diteliti dan dianalisa atau dapat disebut data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- b. Ruang baca FISIP Universitas Jember
- c. Jurnal dan artikel ilmiah
- d. Media internet

1.7.2. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia dalam menjawab suatu fenomena secara sistematis. Maka, hasil yang akan tertulis dalam penelitian ini akan lebih bersifat observasi data-data yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Shinzo Abe mengadakan pemilu lebih awal di tahun 2017.

1.8. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis membaginya kedalam lima bab. Adapun sistematika dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang suatu masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 PARTAI POLITIK DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DI JEPANG

Pada bab ini akan menjelaskan sistem perpolitikan di Jepang mulai dari tata pemerintahan hingga partai politik di Jepang.

BAB 3 PEMERINTAHAN ABE PERIODE KE 2 TAHUN 2012-2017

Pada bab ini akan menjelaskan secara sistematis rekam jejak Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang sejak periode kedua menjabat. Pada periode kedua ini, Abe pernah melaksanakan pemilihan umum Majelis Rendah lebih awal pada tahun 2014 dan pada tahun 2017.

BAB 4 KEPUTUSAN SHINZO ABE MENGADAKAN PEMILIHAN UMUM LEBIH AWAL TAHUN 2017

Pada bab ini akan menjelaskan faktor-faktor dari Shinzo Abe memutuskan untuk mengadakan pemilu lebih awal pada tahun 2017. Bab ini akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi setelah Abe memengakan

pemilihan umum pada tahun 2014 dan memutuskan untuk melakukan pemilihan lebih awal pada tahun 2017.

BAB 5 KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dituliskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2. PARTAI POLITIK DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan partai politik di Jepang dan pembagian kekuasaan di pemerintahan yang akan dijelaskan kedalam beberapa sub bab. Pada sub bab pertama penulis akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan kekuatan lembaga eksekutif antara sistem parlementer dengan sistem presidensial. Pada sub bab kedua akan menjelaskan tentang sejarah Partai politik di Jepang, pentingnya partai politik dalam pemerintahan, dan partai politik yang berkuasa saat ini di Jepang. Sub bab ketiga akan menjelaskan mengenai lembaga legislatif. Sebagai lembaga legislasi, lembaga legislatif di Jepang terdiri dari dua kamar yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Peran dan fungsi kedua Majelis akan dijelaskan pada sub bab ini. Sub bab keempat akan menjelaskan mengenai lembaga Eksekutif. Kabinet merupakan Lembaga Eksekutif di Jepang yang terdiri atas kabinet beranggotakan para Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Peran dan fungsi Menteri dan Perdana Menteri akan dijelaskan dalam sub bab ini. Sub bab kelima akan menjelaskan lembaga Yudikatif. Sebagai lembaga peradilan, lembaga Yudikatif terdiri dari dua tingkatan yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah seperti pengadilan negeri, pengadilan keluarga, dan pengadilan sumir. Pada sub bab terakhir akan menjelaskan mengenai otoritas pemerintahan lokal.

2.1 Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

2.1.1 Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menitik beratkan pada hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sebuah negara. Sistem ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Menurut Arend Lijphart, perkembangan sistem parlementer pada umumnya terbagi melalui tiga fase. Pada awalnya, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem kenegaraan. Kemudian

muncul sebuah Majelis yang menentang hegemoni raja. Terakhir, majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen, yang mengakibatkan pada hilangnya kekuasaan besar seorang raja (Lijpart, 1995).

Dalam sistem ini, Presiden, Raja atau Ratu, dan Kaisar berkedudukan sebagai kepala negara. Fungsi dari Raja adalah sebagai simbol negara dan tidak memiliki kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem parlementer, hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban dari kabinet kepada parlemen. Kabinet yang terbentuk merupakan cerminan dari kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, kabinet harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen.

Selain itu, dalam sistem parlementer terdapat pemisahan tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan (Perdana Menteri). Kedudukan kepala negara dalam sistem ini umumnya dijabat oleh raja atau kaisar atau presiden. Kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sehingga segala kesalahan yang dilakukan kabinet (baik Perdana Menteri maupun para Menteri) tidak dapat melibatkan kepala negara. Oleh karenanya seorang kepala negara tidak bisa dijatuhkan disebabkan kesalahan para Menteri atau kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bila pertanggungjawaban tidak dapat diterima dan parlemen tidak mempercayai kabinet, maka kabinet dapat dibubarkan.

Dalam sistem pemerintahan parlementer ini, yang memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan ialah Perdana Menteri yang berasal dari parlemen. Selain itu sebagai kepala pemerintahan yang fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan, salahsatu hal yang harus dilakukan seorang

perdana menteri berikut dengan menteri-menterinya(kabinet) ialah senantiasa menjaga kepercayaan dan meminta dukungan dari parlemen agar dalam menjalankan tugasnya sehari-hari mendapat dukungan dari parlemen untuk menghindari munculnya mosi yang tak percaya dari parlemen terhadap kabinet yang bisa datang sewaktu-waktu, akibatnya adalah runtuh atau jatuhnya kabinet. Serta maju mundurnya suatu kabinet sangat tergantung pada parlemen, dengan kata lain kabinet akan senantiasa berada dibawah tekanan parlemen.

Pemerintahan parlementer, biasanya dibentuk setelah pemilu yang digelar selesai. Dengan usainya Pemilu, akan terlihat partai mana yang memperoleh kemenangan atau menguasai suara mayoritas di parlemen. Mereka yang mencapai suara mayoritas berhak membentuk kabinet, dan biasanya ketua partai otomatis menjadi perdana menteri.

Sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya penyesuaian antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dapat mudah tercapai. Kelemahannya adalah kabinet atau pemerintahan tidak stabil, karena sering dijatuhkan oleh parlemen. Pergantian kabinet yang terlalu sering mengakibatkan program-program pemerintah sering mengalami kemacetan dan kegagalan. Kesulitan yang lain, suatu Negara sulit untuk membentuk suatu kabinet seandainya tidak menganut dua partai. Dengan multipartai, maka kepala Negara harus membicarakannya dengan partai-partai yang memiliki wakil di parlemen.

2.1.2 Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang langsung oleh presiden. Dalam sistem ini kedudukan lembaga eksekutif tidak tergantung kepada parlemen, karena dasar kekuasaan lembaga eksekutif berada pada rakyat. Sebagai kepala lembaga eksekutif, presiden menunjuk menteri-menterinya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet tidak tergantung dan tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari parlemen, maka para menteri tidak bisa dihentikan oleh parlemen.

Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan Presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai kekuasaan negara. Artinya, Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Itulah sebabnya kekuasaan Presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah pada fungsi legislasi dan kewenangan dibidang yudikatif. Dengan kekuasaan Presiden yang begitu luas, jika dalam sistem pemerintahan parlementer objek yang diperebutkan ialah parlemen, maka dalam sistem pemerintahan Presidensial tidak satupun lembaga negara yang menjadi fokus kekuasaan, peran dan karakter individu Presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi, atau partai politik yang ada dalam negara.

Untuk memahami lebih jauh tentang sistem pemerintahan Presidensial, berikut ini akan dipaparkan karakteristik umum yang menggambarkan sistem pemerintahan Presidensial tersebut, yaitu:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan hanya ada Presiden dan Wakil Presiden.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau bawahan yang akan bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau mengintimidasi parlemen
7. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem pemerintahan Presidensial berlaku sistem atau prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem pemerintahan parlementer yang terpusat pada parlemen (Asshiddiqie, 1997)

Berdasarkan karakteristik yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu sistem pemerintahan presidensil yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Meski masih sulit untuk membedakan secara jelas peran sebagai kepala negara, Presiden dapat dikatakan sebagai simbol negara. Dalam kekuasaan eksekutif sebagai kepala pemerintahan, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden tidak hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam kabinet. Terkait dengan hal tersebut, segala keputusan-keputusan penting dalam sistem presidensil dapat dibuat dengan atau tanpa pertimbangan kabinet.

Dengan pemisahan lebih jelas antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan Presidensial, pembentukan pemerintah tidak tergantung pada proses politik di lembaga legislatif. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer eksekutif sangat tergantung pada dukungan parlemen, maka dalam sistem pemerintahan Presidensial dibangun dalam prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Tidak hanya itu, dengan adanya pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang dibatasi.

2.2 Partai Politik di Jepang

Kemunculan partai politik di Jepang tidak terlepas dari adanya Restorasi Meiji yang pernah terjadi pada tahun 1867. Peristiwa Restorasi Meiji membawa arah perubahan bagi perpolitikan Jepang yang awalnya terbelakang menjadi berkembang hingga sekarang. Pemerintahan Jepang awalnya dipimpin oleh para *Shogun*⁵ mengisolasi diri dari pengaruh asing. Namun setelah kedatangan Amerika Serikat, Jepang kemudian membuka hubungan bilateralnya dengan negara negara

⁵*Shogun* adalah jenderal atau panglima tertinggi dalam perang.

Asing. Masuknya negara-negara asing membuat hilangnya kewibawaan para *Shogun* di mata masyarakat karena para *Shogun* mengizinkan bangsa-bangsa asing masuk dan memberikan pengaruhnya kepada masyarakat dianggap telah mengingkari janjinya.

Awal munculnya partai politik di Jepang memiliki sejarah yang panjang. Partai politik pertama kali terbentuk antara tahun 1870 - 1880 saat munculnya dua garis besar kepartaian mulai terbentuk dikalangan dua bekas anggota kelompok oligarki. Kelompok oligarki yang memerintah menuntut peran politik lebih besar bagi kelas *samurai* dan kelompok – kelompok lain yang tidak terlibat dalam partisipasi politik. Terbentuknya *Diet* bertujuan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Orang-orang tersebut kemudian mendominasi *Diet* sejak awal terbentuknya dan berhasil membuat *Diet* berhadapan dengan eksekutif.

Kaum militer Jepang pada saat itu membubarkan kelompok-kelompok yang menyerupai partai politik secara paksa untuk bergabung kedalam Himpunan Pembantu Pemerintahan Kaisar pada tahun 1940. Pada tahun 1945 saat Jepang mengalami kekalahan perang partai-partai politik mulai muncul kembali. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, proses demokratisasi berkembang dengan pesat. Partai Liberal dan Partai progresif yang merupakan partai sayap kanan melebur menjadi satu menjadi Partai Demokrat Liberal. Setelah tahun 1945 mulai bermunculan partai-partai sayap kiri yang lebih moderat membentuk sebuah Partai Sosialis Demokrat.

Pada tahun 1955, LDP sebagai sebuah partai konservatif muncul dan mendominasi perpolitikan di Jepang Pasca Perang Dunia ke II. LDP yang terdiri dari kelompok pengusaha dan para birokrat lebih dari lima dekade lamanya LDP berkuasa atas pemerintahan Jepang dan hampir tidak terkalahkan. Namun, LDP mulai kehilangan kendali atas pemerintahan nasional pada tahun 1993 ketika salah satu faksi utamanya memisahkan diri dari LDP dan digantikan oleh koalisi partai oposisi selama kurang dari setahun. Koalisi tersebut tidak pernah mengalami kekalahan dalam pemilihan umum hingga pemilihan *House of Representatives* tahun 2009, ketika DPJ mengalahkan LDP dan mengambil alih pemerintahan (Taniguchi et al., 2009).

Partai politik berperan penting bagi jalannya pemerintahan di Jepang. Partai pemenang pemilu akan berkuasa di parlemen atau *Diet* baik di Majelis Tinggi maupun Majelis Rendah. Menjadi partai mayoritas di parlemen merupakan suatu keuntungan karena pembuatan kebijakan dan pemilihan Perdana Menteri ditentukan oleh parlemen. Seluruh kegiatan pemerintahan dalam dan luar negeri ditentukan dan dilaksanakan atas dasar keputusan parlemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kursi partai politik di parlemen dapat mempengaruhi sebuah kebijakan.

Sistem kepartaian di Jepang bekerja dalam sistem pemilihan campuran yang menggabungkan antara pemilihan kursi tunggal dari berbagai macam distrik dan perwakilan proporsional. Partai yang berkuasa saat ini (dari tahun 2012) adalah *Liberal Democratic Party* (LDP). Partai oposisi yang utama dalam pemerintahan adalah *Democratic Party of Japan* (DPJ). Kedua partai tersebut telah membentuk pemerintahan tingkat nasional hampir selama dua dekade lamanya. Pada saat ini partai LDP memiliki koalisi dengan *Buddhist Clean Government Party*, atau *the New Komeito* (CGP) dalam membentuk pemerintahan. Selain itu, terdapat partai kecil lainnya seperti *Japanese Communist Party* (JCP) yang secara konsisten memenangkan beberapa kursi di parlemen, hal tersebut dikarenakan sebagian besar berkat adanya sifat sistem perwakilan proporsional.

Bangsa yang besar membutuhkan kepemimpinan politik yang stabil untuk secara efektif menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang nampak setiap harinya (Hrebenar & Nakamura, 2015). Jepang masih belum memiliki stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan politiknya untuk waktu yang lama. Sejak tahun 2000 hingga sekarang setidaknya Jepang telah mengalami sembilan kali pergantian Perdana Menteri. Lima orang berasal dari LDP dan tiga orang berasal dari DPJ.

Tabel 2.1 Perdana Menteri Jepang dari tahun 2000-2012.

<i>Prime minister</i>	<i>Years</i>	<i>Party</i>
Mori Yoshiro	2000–2001	LDP
Koizumi Junichiro	2001–2006	LDP
Abe Shinzo	2006–2007	LDP
Fukuda Yasuo	2007–2008	LDP
Aso Taro	2008–2009	LDP
Hatoyama Yukio	2009–2010	DPJ
Kan Naoto	2010–2011	DPJ
Noda Yoshihiko	2011–2012	DPJ
Abe Shinzo	2012–	LDP

Sumber: Prime Minister of Japan and His Cabinet

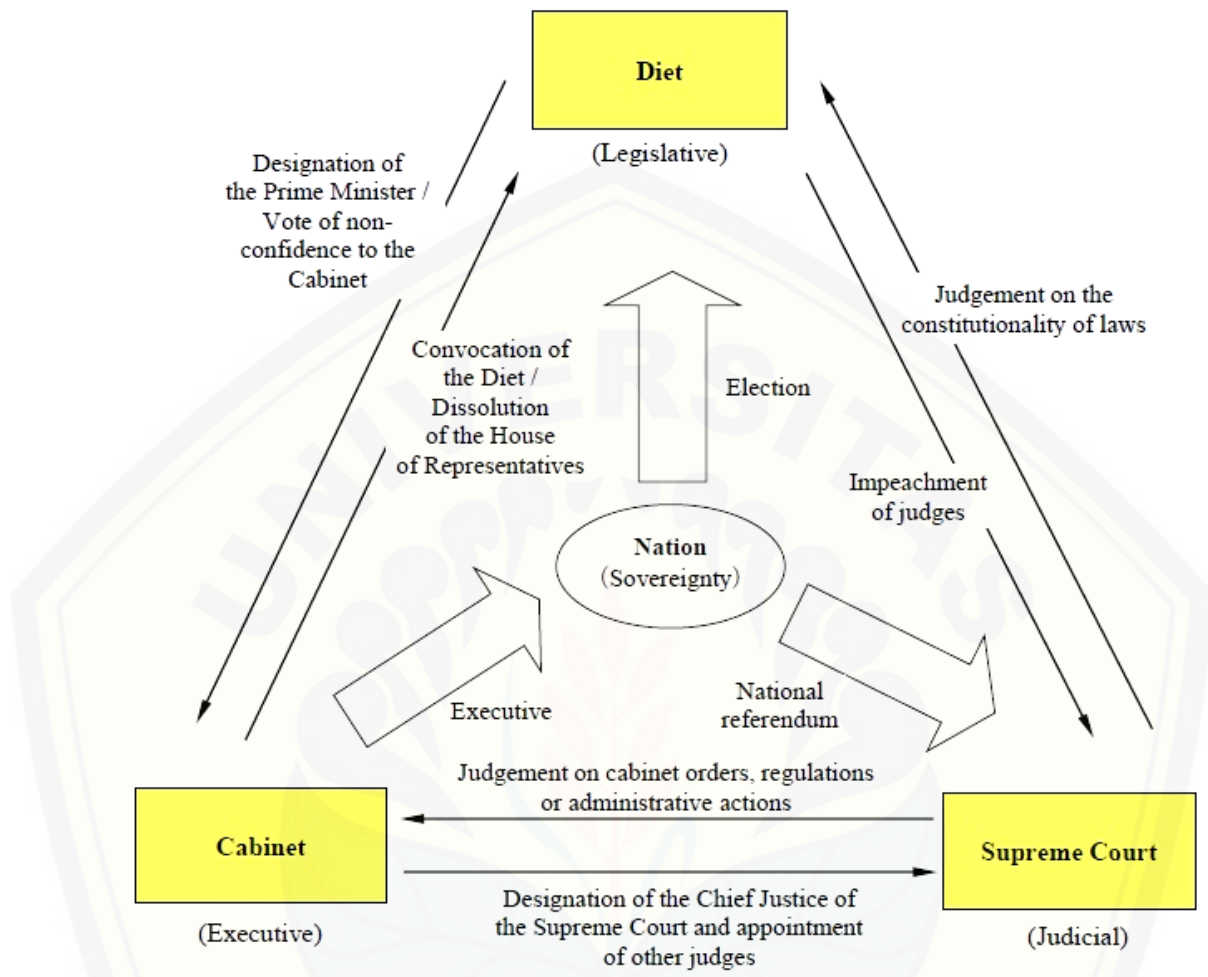
Koizumi Junichiro merupakan salah satu Perdana Menteri yang berhasil memimpin Jepang untuk jangka waktu yang cukup lama (dari tahun 2001-2006). Setelah mengundurkan diri dari Perdana Menteri pada tahun 2006, terdapat tiga orang Perdana Menteri yang berasal dari elit LDP namun tidak menjabat dalam waktu yang cukup lama. Ketika DPJ memenangkan pemilu *House of Representatives* tahun 2009, Hatoyama Yukio, seorang putra dari keluarga elit politik di Jepang, menjabat sebagai Perdana Menteri dipaksa turun dari jabatannya setelah menerima mosi tidak percaya dan mendapatkan dukungan yang rendah dari masyarakat atas skandal yang dialaminya selama sepuluh bulan menjabat (Takenaka, 2010). Hatoyama Yukio kemudian digantikan oleh Naoto Kan, namun Kan kehilangan dukungan dari publik dalam waktu satu bulan dan menyerahkan kepemimpinan kepada Yoshihiko Noda setelah setahun ia menjabat. Setelah pemilihan umum 2012, pemimpin LDP sekaligus mantan Perdana Menteri, Shinzo Abe, kembali berkuasa. Abe merupakan Perdana Menteri terlama di Jepang yang masih menjabat hingga saat ini.

Jepang merupakan sebuah negara maju di Asia Timur yang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dan menganut sistem pemerintahan parlementer (Masuyama & Nyblade, 2004). Konstitusi Jepang merupakan dasar sistem pemerintahan dan sistem politik, didalam konstitusi 1947 disebutkan bahwa Kaisar Jepang merupakan simbol negara sebagai pemersatu rakyat. Konstitusi 1947 memiliki tiga prinsip utama yaitu kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap perang (Web Japan, 1947).

Konstitusi Jepang terdiri dari 11 bab, dan berjumlah 103 pasal. Hak dan kewajiban masyarakat terangkum dalam 31 pasal pada bab ketiga. Hak masyarakat lebih ditekankan daripada kewajiban dengan jaminan hak sipil, politik, dan sosial kepada masyarakat Jepang. Secara umum, konstitusi Jepang menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan memeluk agama; persamaan gender; hak untuk bekerja; dan hak untuk memelihara standar minimum kesehatan dan kebudayaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, konstitusi Jepang membagi kedalam tiga kekuasaan pemerintahan yang berbeda: Lembaga Eksekutif yaitu Kabinet yang di pimpin oleh Perdana Menteri, Lembaga Legislatif yaitu Parlemen (*Diet/Kokkai*), Lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (*Supreme Court*) (Wong, 2000). Maka, kedudukan Kaisar di Jepang sebatas simbol negara dan pemersatu rakyat (Web Japan, 1947). Konstitusi membatasi kekuasaan Kaisar sehingga Kaisar bertugas sebagai kepala negara dalam hal-hal yang bersifat seremonial dan diplomasi, tetapi tidak memegang kekuasaan yang sesungguhnya dalam pemerintahan (Wong, 2000).

Bagan 2.1 Pembagian tiga cabang pemerintahan berdasarkan konstitusi Jepang



Sumber: Prime Minister of Japan and His Cabinet

2.3 Lembaga Legislatif

Parlemen Jepang atau biasa disebut *Diet* memiliki dua kamar, yaitu *House of Representative (Kokkai)* yang merupakan Majelis Rendah dan *House of Councillors (Sangiin)* yang merupakan Majelis Tinggi. Setelah mengalami kekalahan dalam perang dunia II, Amerika Serikat menginginkan Jepang untuk memiliki parlemen dengan sistem satu kamar, akan tetapi Jepang menolak dan memutuskan untuk membentuk *House of Councillors*. Para pemimpin di Jepang menginginkan adanya *House of Councillors* setara dengan Majelis Tinggi. Para pemimpin di Jepang menginginkan adanya Majelis Tinggi sebagai lembaga

legislator independen yang mengutamakan kepentingan nasional serta bertindak sebagai penyeimbang dalam parlemen atau Majelis Rendah yang cenderung bertindak cepat dalam pengambilan keputusan (Fukui, 2004).

Majelis Rendah dan Majelis Tinggi dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Akan tetapi, berdasarkan konstitusi Jepang Majelis Rendah memiliki kekuasaan lebih daripada Majelis Tinggi dalam membentuk rancangan undang-undang, sidang anggaran, pengesahan perjanjian, memilih Perdana Menteri, mengesahkan konstitusi, dan lain sebagainya. Kekuasaan lebih yang dimiliki oleh Majelis Rendah bukan berarti tidak terbantahkan atau *absolut*. Majelis Rendah dapat dibubarkan oleh kabinet sebelum masa jabatan berakhir.

Masyarakat Jepang yang telah berusia 20 tahun keatas memiliki hak untuk memilih wakilnya untuk *Diet* dalam pemilihan umum (Governance et al., 2007). Majelis Rendah beranggotakan 480 anggota yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Anggota Majelis Rendah setidaknya harus berusia diatas 25 tahun dan akan menjabat selama 4 tahun. Meski memiliki masa jabatan selama 4 tahun, anggota Majelis Rendah dapat dibubarkan sewaktu waktu. Dari 480 anggota Majelis Rendah, 300 anggota dipilih secara langsung dari 300 pemilihan distrik. Sedangkan 180 anggota lainnya dipilih berdasarkan sistem perwakilan berimbang yang memberikan kursi kepada partai politik berdasarkan suara yang diperoleh (Web Japan, 1947). Sebaliknya, Majelis Tinggi berjumlah 252 anggota dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dipilih setiap 3 tahun sekali. Untuk menjadi anggota Majelis Tinggi setidaknya berusia 30 tahun keatas. Anggota Majelis Tinggi dipilih melalui dua cara yaitu 100 anggota dengan Jepang sebagai satu konstituensi dan 152 anggota dari 47 prefektur Jepang (Web Japan, 1947).

Tugas utama dari *Diet* adalah menjalankan undang-undang. *Diet* memiliki wewenang dalam memenuhi sejumlah fusi tambahan, termasuk perundingan dan pengesahan anggaran dan lain-lain yang menyangkut kepentingan fiskal, persetujuan perjanjian, penunjukkan Perdana Menteri dan menginisiasi dalam amandemen konstitusi (Bureau & Japan, 2016). Setiap Majelis baik Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi memiliki hak untuk menginvestigasi jalannya pemerintahan, menuntut kehadiran dan kesaksian para saksi dan membuat

dokumen. Sebuah kebijakan dapat diputuskan apabila telah mendapatkan persetujuan oleh kedua majelis. Namun, apabila terjadi perbedaan pandangan dalam pembuatan rancangan anggaran, persetujuan perjanjian, atau pemilihan Perdana Menteri maka keputusan dari Majelis Rendah lebih diutamakan daripada keputusan Majelis Tinggi (Bureau & Japan, 2016).

2.3.1 Majelis Rendah (*House of Representative*)

Berdasarkan konstitusi Jepang (pasal 7), Majelis Rendah dapat dibubarkan oleh kaisar atas saran dan persetujuan dari kabinet. Pembubaran hanya bisa dilakukan terhadap Majelis Rendah. Hal tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi Perdana Menteri karena Perdana Menteri dapat mengubah keseimbangan tidak hanya antara partai yang berkuasa dan partai oposisi tetapi juga diantara faksi partai yang sedang berkuasa.

Konstitusi menetapkan supremasi bagi Majelis Rendah. Fungsi dari Majelis Rendah antara lain:

1. Menyusun rancangan undang-undang,
2. Mencalonkan Perdana Menteri,
3. Meratifikasi perjanjian,
4. Meninjau dan menyetujui anggaran,
5. Mempersiapkan pemerintahan, dan
6. Menyelidiki urusan negara.

Konstitusi Jepang juga memberikan kekuasaan lebih kepada Majelis Rendah untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kabinet (pasal 69), menginisiasi amandemen konstitusi (pasal 96) serta membentuk pengadilan *impeachment* untuk mengadili para hakim Mahkamah Konstitusi (pasal 64 dan 78) (Constituteproject, 2013). Dalam pembuatan keputusan perundang-undangan maupun anggaran, keputusan dari Majelis Rendah lebih berpengaruh daripada Majelis Tinggi. Berdasarkan konstitusi (pasal 60), menyebutkan bahwa anggaran negara harus diserahkan kepada Majelis Rendah terlebih dahulu. Dengan ketentuan seluruh rancangan undang-undang yang penting diajukan kepada Majelis Rendah sebagai langkah awal (Wong, 2000). Dalam menetapkan keputusan besar, konstitusi menyebut hal tersebut efektif dengan syarat

mendapatkan dukungan dua pertiga dari keseluruhan jumlah anggota yang hadir dalam pemungutan suara. Majelis Rendah juga dapat mengabaikan penolakan konstitusi yang dibuat oleh Majelis Tinggi lalu mengesahkannya untuk kedua kalinya.

2.3.2 Majelis Tinggi (*House of Councillors*)

Majelis Tinggi di Jepang tidak dapat dibubarkan oleh kabinet. Masa jabatan dari anggota Majelis Tinggi akan berakhir pada saat Majelis Rendah dibubarkan. Dalam keadaan darurat nasional, kabinet dapat mengadakan pertemuan dengan Majelis Tinggi, tetapi tindakan tersebut bersifat sementara, tidak sah dan tidak berlaku kecuali jika mendapatkan kesepakatan Majelis Rendah dalam waktu sepuluh hari setelah terbentuk anggota *Diet* baru.

Sama seperti Majelis Rendah, Majelis Tinggi memiliki wewenang untuk membuat rancangan undang-undang untuk kemudian diusulkan kedalam konstitusi. Hal tersebut memungkinkan untuk melakukan investigasi yang terkait dengan pemerintah dan memungkinkan untuk menghadirkan kesaksian para saksi dan pembuat dokumen.

Konstitusi menetapkan bahwa keputusan Majelis Rendah lebih diutamakan daripada Majelis Tinggi dalam beberapa hal, yaitu:

1. Jika kedua majelis tidak sepakat atas usulan konstitusi,
2. Nominasi calon Perdana Menteri,
3. Pembahasan anggaran,
4. Penyerahan mosi percaya atau tidak terhadap kabinet.

Meskipun konstitusi menetapkan bahwa Majelis Rendah dapat mengabaikan keputusan Majelis Tinggi jika memperoleh dua pertiga dukungan anggota Majelis Rendah, faktanya hal tersebut jarang terjadi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak memiliki cukup kursi (dua pertiga) di Majelis Rendah (Wong, 2000).

2.4 Lembaga Eksekutif

Dalam sistem pemerintahan Jepang, kabinet merupakan Lembaga Eksekutif. Kabinet beranggotakan Perdana Menteri dan menteri-menteri. Perdana Menteri merupakan pemimpin dalam Lembaga Eksekutif yang bertugas menjalankan roda pemerintahan dalam negeri dan sebagai wakil negara dalam urusan luar negeri. Perdana Menteri memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, tetapi kedaulatan milik rakyat seutuhnya.

2.4.1 Kabinet

Dalam konstitusi Jepang (pasal 66) menyatakan bahwa kabinet terdiri atas Perdana Menteri dan Menteri. Perdana Menteri merupakan pemimpin dalam kabinet dapat memilih langsung Menterinya untuk menjalankan roda pemerintahan. Separuh dari Menteri dalam kabinet harus terpilih dari *Diet* dan sisanya Perdana Menteri berhak menunjuk siapa saja. Dengan ketentuan hampir seluruh Menteri kabinet berasal dari anggota *Diet*. Sebagian besar Menteri yang terpilih merupakan anggota Majelis Rendah yang telah menjabat setidaknya 6 atau 7 kali masa jabatan, beberapa juga terpilih dari Majelis Tinggi dengan ketentuan pernah menjabat sebanyak dua atau tiga periode.

Tugas utama dari kabinet yang diatur dalam konstitusi adalah:

1. Menjalankan konstitusi dengan tepat,
2. Memimpin urusan negara,
3. Mengakhiri perjanjian dan memperoleh persetujuan *Diet* baik sebelum atau sesudahnya,
4. Mengelola layanan sipil sesuai dengan undang-undang
5. Menyiapkan dan menyampaikan anggaran belanja kepada *Diet*
6. Memberlakukan perintah kabinet demi membuat hukum yang efektif dengan ketentuan konstitusi, dan
7. Memberikan amnesti, penangguhan hukuman, atau pengampunan.

2.4.2 Perdana Menteri

Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh *Diet* dengan syarat statusnya merupakan warga sipil dan merupakan anggota dari

Diet. Setelah seluruh anggota *Diet* menentukan calon Perdana Menteri, calon tersebut harus mendapatkan mosi kepercayaan dari Majelis Rendah untuk menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri terpilih kemudian akan dilantik oleh Kaisar. Berdasarkan konstitusi Jepang (pasal 68), setidaknya separuh dari menteri kabinet dipilih oleh *Diet*, dan sisanya dipilih oleh Perdana Menteri (Constituteproject, 2013). Perdana Menteri berhak untuk menentukan dan membubarkan menteri-menterinya jika dirasa tidak cakap dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam sistem kabinet parlementer Jepang, Lembaga Eksekutif mencerminkan apa yang menjadi kehendak *Diet*. Kabinet terbentuk atas dukungan *Diet* dan kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen dan melaporkan segala aktivitas yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas eksekutifnya kabinet dibantu oleh birokrasi. Di dalam konstitusi Jepang tidak terdapat aturan batasan maksimal seseorang menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun, pada saat Majelis Rendah melakukan mosi tidak percaya atau penolakan atas mosi percaya, Perdana Menteri harus membubarkan Majelis Rendah dalam waktu 10 hari atau mengundurkan diri bersama para menteri dan kabinetnya.

Dalam satu dekade terakhir setidaknya telah terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak tujuh kali yaitu: Shinzo Abe (2006-2007), Yasuo Fukuda (2007-2008), Taro Aso (2008-2009), Yukio Hatoyama (2009-2010), Naoto Kan (2010-2011), Yoshihiko Noda (2011-2012), Shinzo Abe (2012-sekarang). (Bureau & Japan, 2016) Pergantian Perdana Menteri Jepang yang sering terjadi tidak terlepas hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Kingston, 2013). Kritikan yang berasal dari publik Jepang ditambah media massa yang mengekspose kritikan-kritikan tersebut menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi pemerintah yang akhirnya dapat membuat seorang Perdana Menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Adanya rasa bersalah dan budaya malu yang dimiliki masyarakat Jepang menjadi salah satu faktor sering terjadinya pergantian Perdana Menteri di Jepang (Azimi, 2010). Perdana Menteri yang merasa tidak berhasil memenuhi janji-janjinya, atau merasa malu atas kesalahan dalam masa kepemimpinannya akan mengundurkan diri dari jabatannya. Janji yang diucapkan oleh seorang Perdana

Menteri Jepang merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar, karena janji yang pernah diucapkan akan selalu mendapatkan tuntutan dari masyarakat Jepang.

Konstitusi telah mengatur fungsi dan hak istimewa yang dimiliki oleh seorang Perdana Menteri, yaitu:

1. Menunjuk dan mengganti Menteri dalam kabinet yang dipimpin,
2. Memberikan rancangan Undang-Undang dan melaporkan urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri kepada *Diet*,
3. Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan,
4. Menandatangani seluruh keputusan kabinet dan Undang-Undang,
5. Menetapkan tanggal pemilihan umum, dan
6. Memberikan persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh menteri lain.

Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri di Jepang memiliki wewenang untuk dapat membubarkan Majelis Rendah kapan saja dan memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum. Hal ini tentu saja merupakan salah satu kekuatan politik terbesar yang dimiliki oleh seorang Perdana Menteri di Jepang. Kewenangan untuk membubarkan *Diet* biasanya disisipkan isu-isu penting dari tujuan mereka mengadakan pemilihan umum atau untuk meningkatkan kontrol partai mereka di *Diet*.

Konstitusi Jepang memberikan kekuasaan lebih seorang Perdana Menteri untuk dapat membubarkan Majelis Rendah. Pertama teratur dalam pasal 7 yang mengatakan bahwa Kaisar, dengan saran dan persetujuan kabinet dapat membubarkan *Diet*. Namun, keterlibatan Kaisar hanyalah sebuah formalitas, dan keputusan untuk membubarkan *Diet* terletak pada Perdana Menteri sebagai ketua Kabinet. Dengan dibubarkannya *Diet* oleh Perdana Menteri, maka secara otomatis pemilihan umum Majelis Rendah diselenggarakan dalam waktu 40 hari sejak *Diet* dibubarkan (pasal 54). Kedua, pasal 69 konstitusi Jepang mengatakan bahwa Majelis Rendah dapat membubarkan diri dalam waktu 10 hari setelah memberikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Sama seperti dengan pasal 7, pembubaran berdasarkan pasal 69 secara resmi dilakukan oleh kaisar. Setelah pembubaran

majelis rendah Diet, sesuai dengan Pasal 54 Konstitusi, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 40 hari.

2.4.3 Menteri

Menteri bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan melalui kementerian yang sedang dijabat. Perdana Menteri memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 68). Kinerja Menteri yang dirasa tidak memberikan perubahan yang lebih baik. Menteri dapat mengajukan diri untuk menjabat atas kementerian atau lembaga tertentu atau tanpa mengajukan diri. Penunjukkan jabatan menteri yang tidak melalui pengajuan diri biasanya lebih bersifat politis dan tidak memiliki tugas administratif khusus.

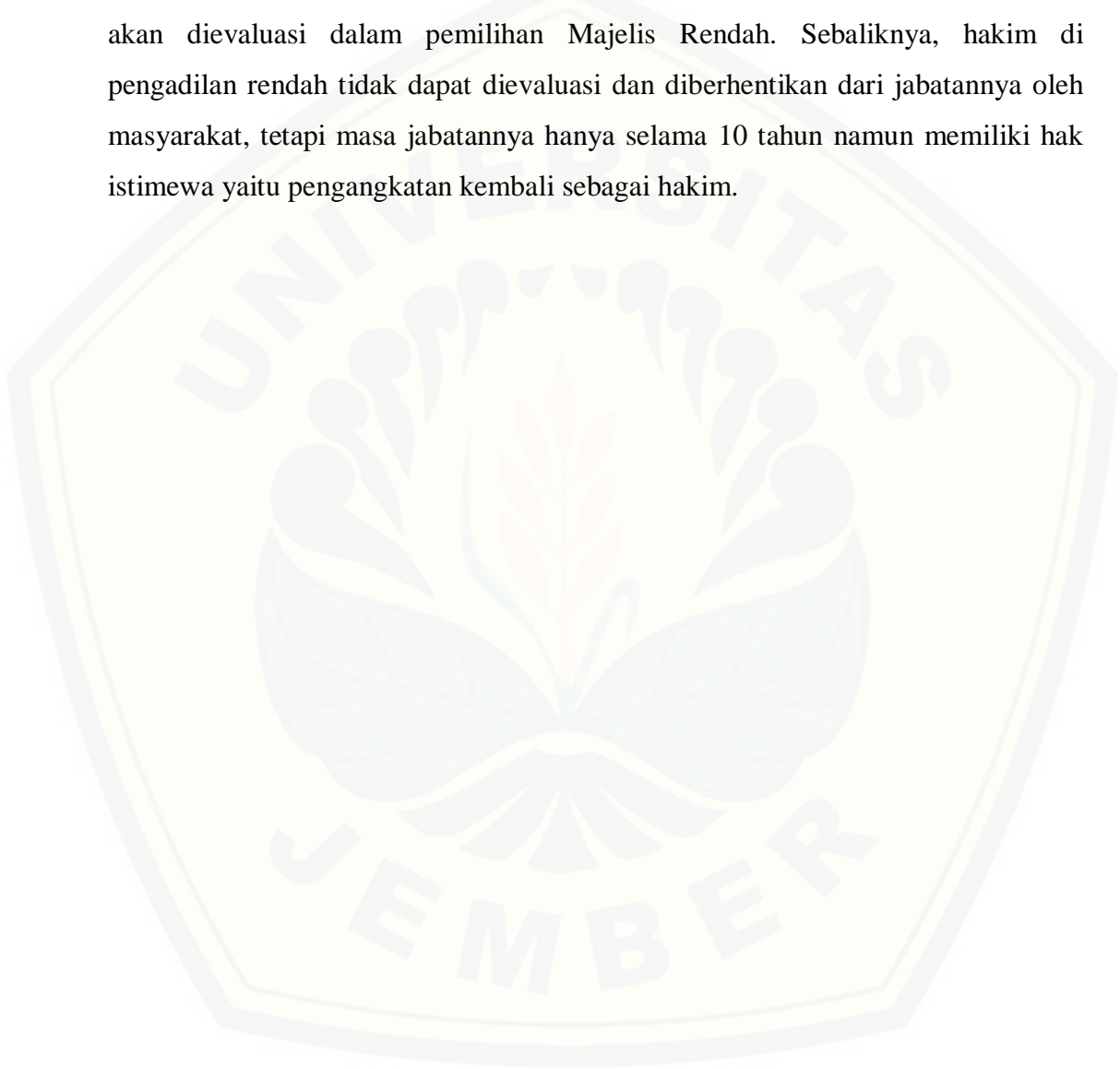
2.5 Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif dalam pemerintahan Jepang bersifat independen dan bebas dari intervensi dua Lembaga lainnya, terutama intervensi dari Lembaga Eksekutif. Hal ini bertujuan agar Lembaga Yudikatif dapat bekerja secara maksimal dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan adanya prinsip bebas intervensi, Lembaga Yudikatif tidak akan memihak dan akan tetap memegang norma hukum serta keadilan dalam menghadapi suatu perkara.

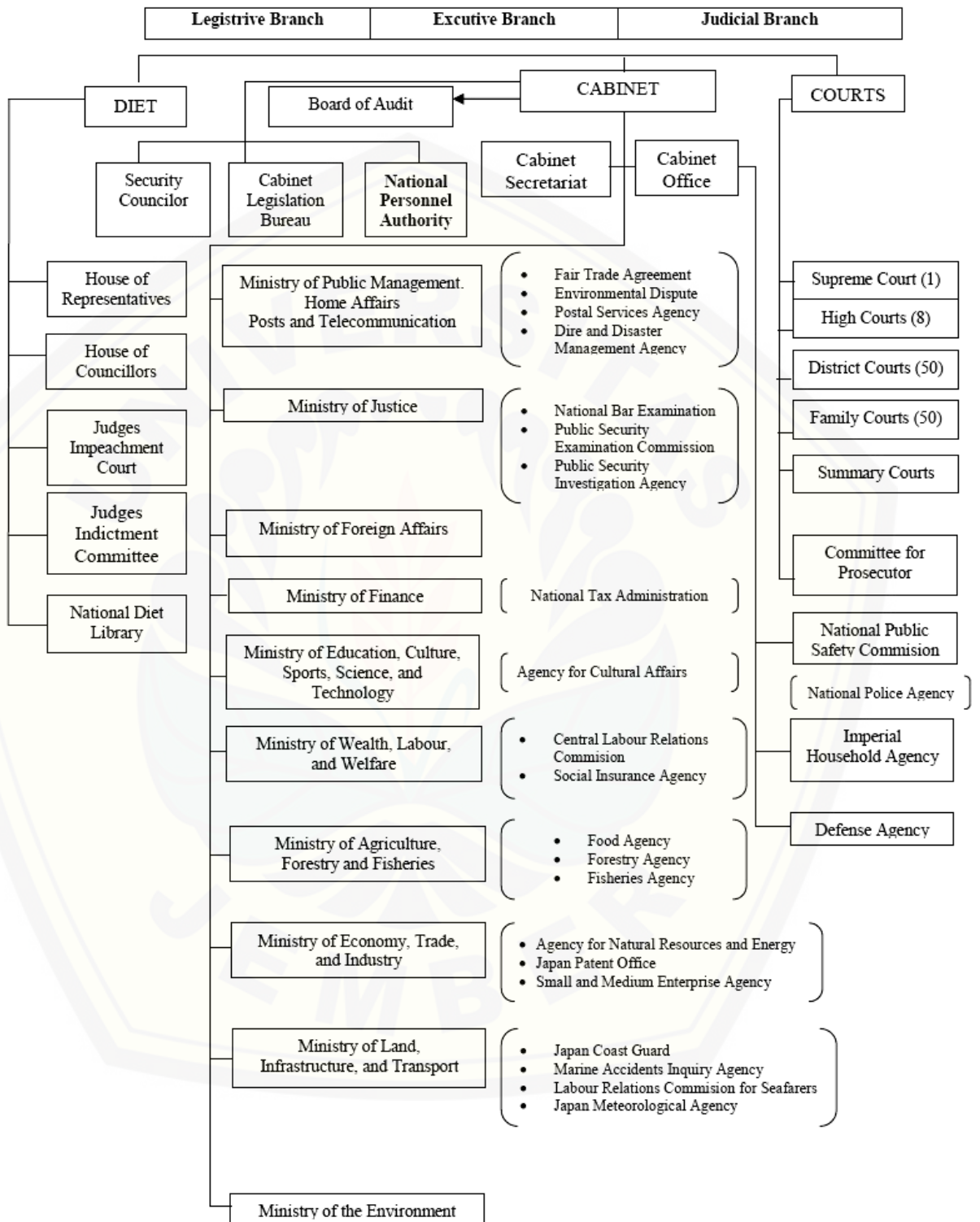
Terdapat dua tingkatan pengadilan di Jepang, yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan keluarga, dan pengadilan sumir⁶(Kedutaan Besar Jepang di Indonesia n.d.). Pengadilan tertinggi di Jepang adalah Mahkamah Agung yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Calon ketua Mahkamah Agung diajukan oleh kabinet kemudian ditunjuk oleh Perdana Menteri lalu akan dilantik oleh kaisar. Sedangkan 14 hakim lainnya akan ditunjuk oleh kabinet (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia n.d.).

⁶Pengadilan sumir merupakan pengadilan yang menangani kasus pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas dan lain-lain.

Hakim di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri akan pensiun di usia 65 tahun. Sedangkan hakim di Mahkamah Agung dan pengadilan sumir akan pensiun di usia 70 tahun (Hermansyah, 2015). Masyarakat dapat memberhentikan ketua Mahkamah Agung setiap 10 tahun sekali dalam refrendum pada saat pemilihan umum. Hakim Mahkamah Agung akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat dan akan dievaluasi dalam pemilihan Majelis Rendah. Sebaliknya, hakim di pengadilan rendah tidak dapat dievaluasi dan diberhentikan dari jabatannya oleh masyarakat, tetapi masa jabatannya hanya selama 10 tahun namun memiliki hak istimewa yaitu pengangkatan kembali sebagai hakim.



Bagan 2.2 Sistem Pemerintahan Jepang



Sumber : *Division for Public Administration and Development Management (DPADM), Department of Economic and Social Affairs (DESA)*

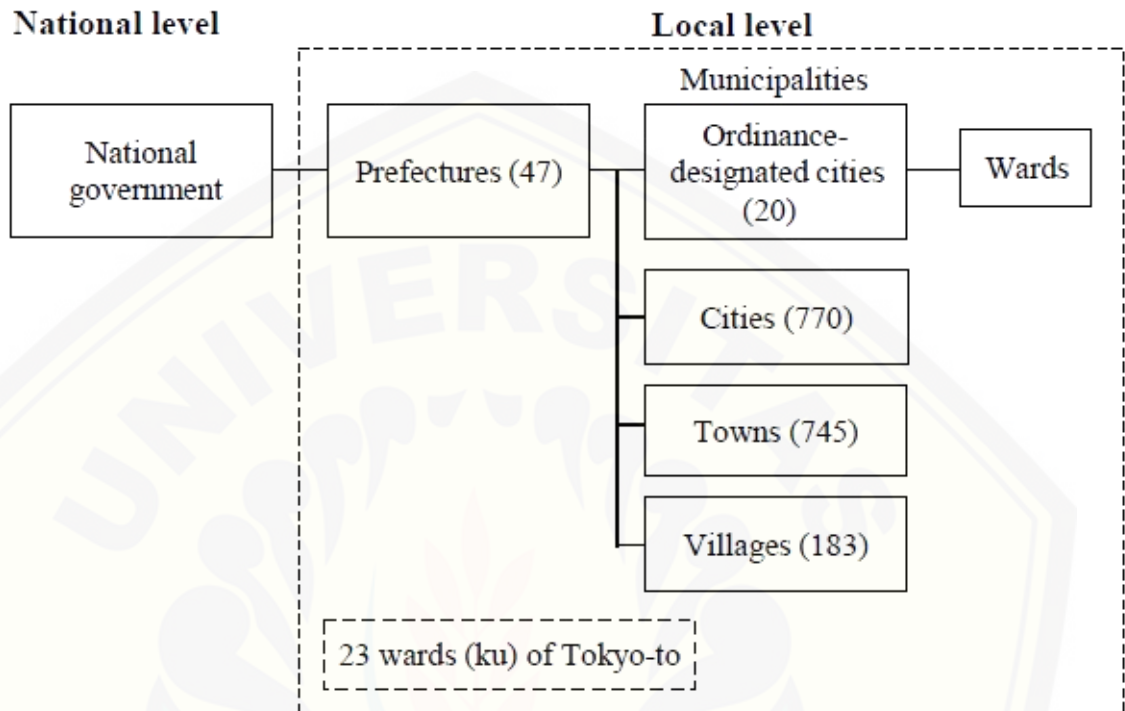
2.6 Pemerintahan Lokal

Sistem pemerintahan lokal Jepang dibangun atas dua prinsip utama. Pertama, ia menyediakan hak untuk mendirikan entitas publik lokal otonom yang independen dari pemerintah nasional. Kedua, penduduk daerah-daerah lokal ini berpartisipasi dalam dan menangani, kegiatan entitas publik lokal. Sistem pemerintahan lokal Jepang berasal dari periode sebelum Perang Dunia II, terutama dari konsep entitas lokal otonom. Setelah perang, konsep pemerintahan otonom dimasukkan ke tingkat yang lebih besar. Undang-Undang Otonomi Lokal menentukan jenis dan kerangka organisasi entitas publik lokal, serta pedoman untuk administrasi mereka. Hal ini juga menentukan hubungan dasar antara entitas lokal ini dan pemerintah pusat.

Entitas publik lokal Jepang yang sangat penting, yaitu kota madya, kota, dan desa (*shichoson*), lingkungan khusus Tokyo (*tokubetsuku*), dan prefektur (*todofuken*) disebut sebagai pemerintah daerah. Pada 1 April 2016, Jepang memiliki 47 prefektur dengan jumlah kotamadya sebanyak 1.718 ditambah dengan 23 distrik (*ku*) di Tokyo metropolitan. Untuk memperkuat fondasi administratif dan fiskal dari kotamadya, maka dilakukan penggabungan kota lalu disahkan oleh undang-undang. Dampak dari penggabungan tersebut adalah berkurangnya jumlah kotamadya hampir setengah dari 3.232 pada tahun 1999 (Bureau & Japan 2016). Penggabungan kota harus memiliki kriteria tertentu (yaitu populasi berjumlah 500.000 jiwa atau lebih) sebagai syarat untuk “ordonasi”⁷. Dengan adanya hal tersebut, menjadikan otoritas administratif dan fiskal setara dengan prefektur.

⁷Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ordonasi adalah peraturan pemerintah, surat pemerintah, peraturan kerajaan.

Bagan 2.3 Sistem Pemerintahan Berdasarkan Tingkatan

Government System by Level¹⁾ (as of April 1, 2016)

1) Figures in parentheses indicate number.

Sumber: Ministry of Internal Affairs and Communications.

Pemerintahan lokal Jepang memiliki ketentuan tersendiri dalam melaksanakan praktik demokrasi yang tidak terlihat dalam tingkat nasional. Sebagai contoh, dengan mengumpulkan petisi sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih di suatu wilayah tertentu, masyarakat dapat meminta kepala pemerintahan lokal untuk menetapkan, mengubah atau bahkan menghapus suatu kebijakan tertentu (Hays, 2013). Atau dengan persentase yang sama, masyarakat setempat dapat meminta pengawas melakukan audit akan kinerja kepala daerah. Petisi yang dibuat oleh masyarakat juga dapat dibuat di komisi pemilihan lokal untuk membubarkan dewan lokal atau untuk memecat pemimpin terpilih atau bahkan pejabat lokal.

BAB 3. PEMERINTAHAN ABE PERIODE KE 2 TAHUN 2012-2017

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang dinamika politik Jepang pada tahun 2012-2017 pada masa kepemimpinan Abe periode ke 2. Dinamika perpolitikan yang terjadi di Jepang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebuah kebijakan. Penulis akan menjelaskan secara sistematis dinamika perpolitikan yang terjadi di Jepang kedalam beberapa subbab. Pada subbab pertama penulis akan menjelaskan dinamika politik yang terjadi di Jepang pada tahun 2012-2014. Abe menjabat kembali sebagai Perdana Menteri di Tahun 2012 setelah memenangkan pemilu Majelis Rendah. Dua tahun menjabat sebagai Perdana Menteri, Abe membubarkan *Diet* untuk kemudian mengadakan pemilihan umum pada tahun 2014. Pemilihan umum pada tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang dilakukan dua tahun lebih awal dari jadwal pemilihan umum yang seharusnya berlangsung pada tahun 2016.

Subbab kedua penulis akan menjelaskan dinamika politik Jepang sejak tahun 2014-2017. Dinamika politik pemerintahan Abe pada tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami pasang surut. Skandal dalam kabinet Abe yang terjadi menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Abe. Hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap LDP terlihat dari kalahnya LDP dalam pemilihan Gubernur di Tokyo oleh partai lokal pada tahun 2017. Beberapa bulan setelah kalah dalam pemilihan di ibukota, Abe membubarkan *Diet* dan melaksanakan pemilihan umum Majelis Rendah lebih awal yang seharusnya dilangsungkan pada tahun 2018.

Pada subbab ketiga penulis akan memaparkan elektabilitas Abe. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya angka elektabilitas Abe. Pada tahun 2012, ketika Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri, Abe mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dukungan masyarakat terhadap Abe mengalami pasang surut sebagai akibat dari dinamika politik dalam negeri yang terjadi. Pada subbab ini penulis akan menjelaskan mengenai skandal yang membuat turunnya elektabilitas Abe.

Pada subbab keempat penulis akan menjelaskan mengenai *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Abe. Gaya kepemimpinan Abe berubah dari gaya kepemimpinan sebelumnya pada saat ia menjadi Perdana Menteri pada tahun 2006. Abe lebih ahli dalam mengganti posisi-posisi menteri yang terlibat dalam skandal untuk mempertahankan elektabilitasnya.

3.1 Dinamika Politik Jepang Tahun 2012-2014

Kemenangan LDP pada pemilihan umum Majelis Rendah tahun 2012 mengantarkan Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri setelah sempat menjabat pada tahun 2006 dan mengundurkan diri setahun kemudian. Koalisi LDP dan Komeito yang berhasil memperoleh dua pertiga suara mayoritas *Diet* pada kepemimpinan Abe terbukti dapat mengabaikan perselisihan kebijakan yang terjadi antara Majelis Rendah dengan Majelis Tinggi. Abe menyadari adanya kemungkinan akan timbul masalah dalam pemerintahan jika LDP dan koalisi kehilangan kendali dalam Majelis Tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2007 dan 2010⁸. Hilangnya kendali terhadap pemerintahan akibat perbedaan dominasi partai politik dalam Majelis Rendah dan Majelis Tinggi menyebabkan macetnya roda pemerintahan yang dikenal sebagai “*Twisted Diet*”. Namun, disisi lain jika LDP mampu menguasai Majelis Tinggi dan Majelis Rendah maka pemerintahan akan dapat berjalan lancar tanpa adanya perselisihan antar Majelis.

3.1.1 Kebijakan *Abenomics*

Kemenangan LDP dalam pemilihan umum Majelis Rendah tahun 2012 menjadikan Abe sebagai Perdana Menteri kedua kalinya setelah menjabat pada tahun 2006-2007. Abe datang membawa sebuah paket kebijakan ekonomi yang diberi nama *Abenomics*. Kebijakan *Abenomics* memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan stagnansi ekonomi Jepang sejak masa “dekade yang hilang” atau “*The Lost Decade*” pada tahun 1990-an. Paket kebijakan *Abenomics* ini terdiri

⁸Pada tahun 2007 saat Abe masih menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, LDP mengalami kekalahan dalam pemilihan umum Majelis Tinggi. Pada tahun 2010 saat DPJ memegang kendali atas pemerintahan, LDP kembali mengalami kekalahan dalam Majelis Tinggi

atas tiga anak panah atau “*arrows*” yang berisi tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural.

Melalui kebijakan moneter baru yang berkoordinasi dengan *Bank of Japan* (BoJ), Abe berjanji untuk memimpin Jepang kembali ke jalur inflasi yang terkendali dan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang akan menghasilkan lagi pertumbuhan bersama dan inklusi sosial tanpa memprioritaskan redistribusi. Sehingga ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan dan daya beli yang lebih tinggi dari masyarakat, termasuk di daerah pedesaan. Sebagai contoh, sejak Abe memegang kekuasaan, Abe dan kabinetnya berulang kali melakukan lobi untuk menaikkan upah pekerja (Tabuchi, 2014). Hal ini merupakan keterlibatan negosiasi yang mengejutkan bagi pihak pekerja antara serikat pekerja dan pengusaha bagi seorang politikus konservatif.

Kedua anak panah kebijakan *Abenomics* telah diluncurkan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, namun Abe masih perlu membenahi anak panah ketiga kebijakan *Abenomics* yaitu reformasi struktural. Untuk menjalankan kebijakan ketiga *Abenomics*, Abe telah melakukan inovasi, efisiensi, daya saing, dan produktivitas tenaga kerja. Turut sertanya Jepang kedalam kerjasama transpasifik atau *Trans-Pacific Partnership* (TPP) memberikan pengaruh dalam mengatasi gejala dalam negeri terhadap reformasi kebijakan ekonomi yang penting dilakukan tetapi menyakitkan (Meltzer, 2013). Kebijakan *Abenomics* telah memberikan modal politik bagi Abe, namun Abe harus menggunakan modal politik tersebut untuk menindaklanjuti reformasi struktural.

3.1.2 Pemilu Majelis Tinggi Tahun 2013

Sebelum pemilihan umum Majelis Tinggi pada tahun 2013 berlangsung, pemerintahan Abe dihadapkan oleh dua masalah besar yaitu masalah energi dan *Abenomics*. Awal kemunculan kebijakan *Abenomics* membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu mengatasi stagnansi ekonomi Jepang yang telah berlangsung selama dua dekade. Sebagai contoh, meningkatnya indeks saham Nikkei 225 sebesar 150% pada awal berjalannya kebijakan *Abenomics* menjadi

tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut (Merler, 2018). Namun, sebulan sebelum pemilihan Majelis Tinggi harga saham mengalami penurunan secara drastis menjadikan masyarakat ragu akan kebijakan *Abenomics*. LDP dan Abe kemudian bertindak cepat dengan memberikan pengumuman angka-angka keberhasilan kebijakan *Abenomics* agar dapat mempertahankan elektabilitasnya menjelang pemilihan Majelis Tinggi.

Pada pemilihan umum Majelis Tinggi LDP dan koalisi kembali memperoleh kemenangan yang cukup mengesankan. LDP dan koalisi, Komeito, memperoleh 65 suara dan komeito memperoleh 11 suara dari 121 jumlah kursi yang diperebutkan. Dengan demikian LDP memperoleh 135 suara (55 persen) total suara dari 242 kursi di Majelis Tinggi (Katsuyuki, 2013). Abe banyak mendapatkan pujian atas kemenangan ganda yang diperoleh LDP setelah berhasil memenangkan pemilihan umum Majelis Rendah 2012.

3.1.3 Skandal dalam kabinet Abe

Pada periode kedua sebagai Perdana Menteri tahun 2012, Abe mengalami perkembangan yang sangat pesat. Abe segera mengganti anggota kabinetnya yang terlibat dalam skandal. Dalam *reshuffle* kabinet kedua, Abe menunjuk Midori Matsuhima dan Yuko Obuchi, dua wanita yang memiliki elektabilitas tinggi menjabat sebagai menteri dalam kabinetnya. Hal tersebut dilakukan Abe sebagai upaya memajukan posisi wanita di pemerintahan dan masyarakat (McCurry, 2014).

Midori Matsuhima mengundurkan diri dari jabatannya setelah partai oposisi mengajukan tuntutan pidana kepadanya. Pihak oposisi mengatakan bahwa tim sukses Midori Matsuhima telah melakukan penyalahgunaan dana politik dengan membagikan pamflet bertuliskan namanya kepada pemilih di distriknya (McCurry, 2014). Yuko Obuchi juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri karena adanya pengeluaran berlebihan yang dilakukan oleh kelompok pendukung politiknya (Yoshida 2014). Abe merencanakan pengunduran kedua menteri wanita dalam kabinetnya untuk mengundurkan diri pada hari yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah berlarut larutnya skandal yang dialami

oleh kedua menterinya yang dapat berdampak serius terhadap dukungan kabinet atau LDP.

3.1.4 Keputusan Abe mengadakan pemilihan umum Majelis Rendah 2014

Pada tanggal 18 November, Abe mengumumkan akan membubarkan *Diet* pada tanggal 21 November dan mengadakan pemilihan cepat pada tanggal 14 Desember. Dalam pidato pembubaran *Diet*, Abe mengatakan bahwa pemilihan tersebut merupakan sebuah mandat bagi Abe untuk menunda kenaikan pajak konsumsi (dari 8% menjadi 10%) yang direncanakan pada Oktober 2015 menjadi April 2017. Dengan kata lain, pemilu 2014 merupakan sebuah refrendum terhadap kebijakan *Abenomics*.

Pertaruhan Abe dalam mengadakan pemilihan umum Majelis Rendah 2014 berbuah manis. LDP dan koalisi berhasil memenangkan kembali pemilihan umum bahkan mendapatkan tambahan suara dari pemilihan sebelumnya di tahun 2012. LDP dan koalisi berhasil memperoleh 326 total suara (291 suara untuk LDP dan 35 suara untuk Komeito) (Sato, 2015) yang secara otomatis memperpanjang masa kekuasaan LDP di Majelis Rendah untuk empat tahun kedepan. Sedangkan DPJ yang hanya memperoleh 57 suara pada pemilihan umum 2012 kembali bangkit dengan memperoleh 73 kursi, dan Partai Komunis Jepang (JCP) meningkat menjadi 21 kursi (Sato, 2015).

Keputusan Abe mengadakan pemilihan umum Majelis Rendah tahun 2014 tampaknya bukan keputusan yang tepat. Kebijakan *Abenomics* telah membawa dampak negatif pada perekonomian Jepang dan membawa masuk perekonomian Jepang pada resesi setelah mengalami kenaikan pajak konsumsi. Pemerintahan Abe juga baru saja mengalami kemunduran politik serius saat dua anggota perempuan dalam kabinet dipaksa mengundurkan diri karena keterlibatan dalam skandal undang-undang pemilu. Kedua wanita tersebut merupakan sosok penting dan merupakan simbol utama dalam kebijakan *Womenomics*.

Dinamika perpolitikan yang terjadi membuat Abe khawatir tidak dapat memenangkan pemilihan umum jika dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemilihan umum yang semestinya (2016). Tidak adanya kepastian akan situasi

perpolitikan dalam sisa masa jabatan membuat Abe memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum. Di sisi lain, kebijakan Abe mengadakan pemilihan lebih awal merupakan cara Abe untuk tetap mempertahankan koalisi LDP dan Komeito agar tetap memegang kontrol atas pemerintahan. Mengadakan pemilihan lebih awal merupakan sebuah tindakan yang berani sekaligus mengejutkan, hal tersebut dapat menjadi sebuah contoh dari gaya kepemimpinan proaktif Abe. Tindakan proaktif Abe terlihat pada saat ia membubarkan *Diet* sebelum partai-partai oposisi siap menghadapi pemilihan umum.

3.2 Dinamika Politik Jepang Tahun 2014-2017

Dibawah pemerintahan Abe, LDP berhasil memperoleh kemenangan yang mengesankan. LDP berhasil memenangkan dua kali pemilihan Majelis Rendah pada tahun 2012 dan 2014 serta memenangkan dua kali pemilihan Majelis Tinggi tahun 2013 dan 2016. Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh LDP menunjukkan bahwa LDP merupakan salah satu partai tersukses. Faktor dari dominasi LDP tidak terlepas dari lemahnya oposisi saat itu. Melemahnya kekuatan oposisi dimanfaatkan oleh Abe untuk melaksanakan pemilihan umum untuk dapat mengamankan kekuasaannya di pemerintahan.

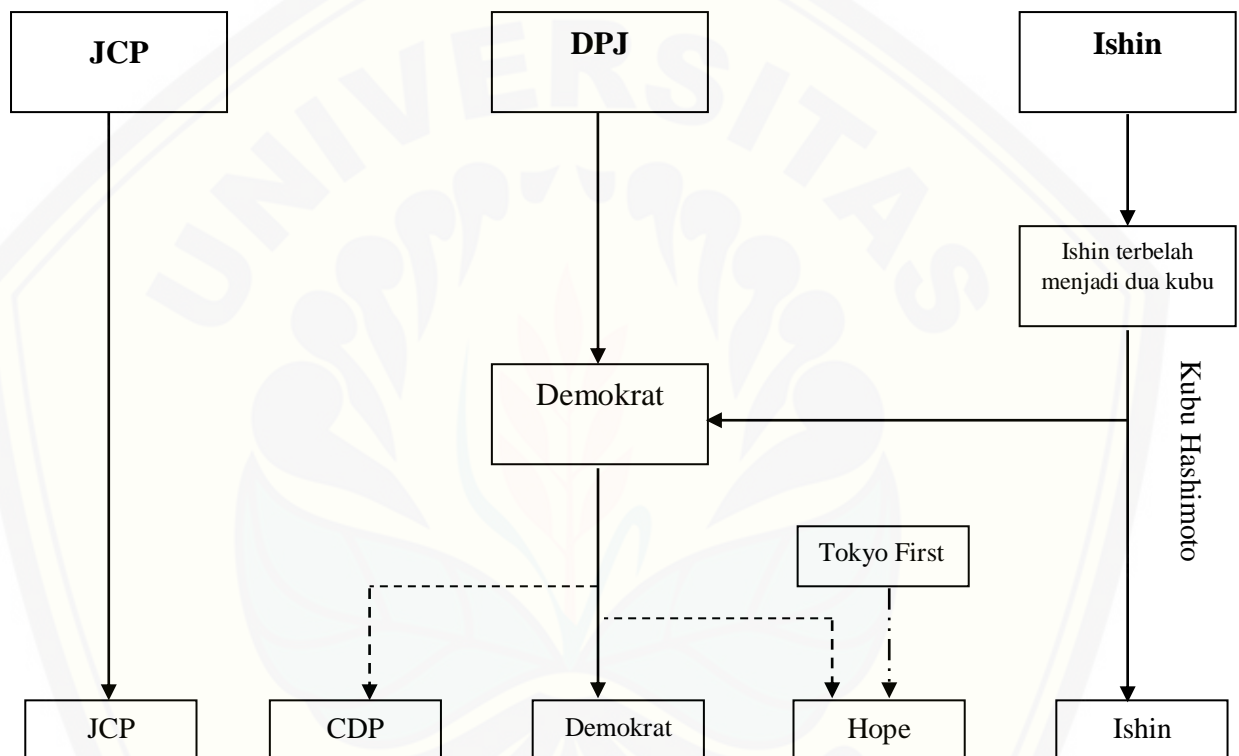
3.2.1 Partai oposisi pasca pemilihan umum Majelis Rendah 2014

Kembaliya kontrol LDP di pemerintahan membuat sebuah skema politik baru dalam negeri. Tidak sedikit elit-elit politik bahkan partai-partai politik bersikap membingungkan setelah kembalinya LDP di pemerintahan seperti misal, partai oposisi terfragmentasi, keluarnya anggota-anggota partai membentuk partai baru, dan tuntuhnya kekuatan partai-partai oposisi. Sebagai dampak dari pemilihan umum 2014, hanya terdapat tiga partai yang dianggap sebagai oposisi pemerintahan yaitu, DPJ, Ishin (JIP), dan Partai Komunis Jepang (JCP).

Ishin terpecah menjadi dua faksi pada bulan Oktober 2015. Salah satu faksi Ishin kemudian bergabung dengan DPJ dan membentuk Partai Demokrat atau Demokrat (Sieg, 2016). Yuriko Koike, yang merupakan mantan anggota partai LDP bersama dengan Masaru Wakasa membentuk partai Harapan atau *Kibonoto* pada tahun 2017 (Nikkei, 2017). Pada bulan Oktober 2017, Yukio Edano

bersama mantan anggota partai LDP membentuk partai baru Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) yang merupakan partai politik terbesar kedua di Jepang (Sim 2017). Dengan terpecahnya oposisi terbesar setelah pemilihan umum 2014, secara tidak langsung kekuatan partai oposisi berkurang secara signifikan pada saat menghadapi pemilihan umum Majelis Rendah 2017.

Bagan 3.1 Partai Oposisi Jepang Tahun 2014-2017



Sumber: hasil visualisasi penulis

Pasca pemilihan umum 2014, Ishin merupakan partai pertama yang melakukan perombakan sebagai langkah untuk mengalahkan LDP. Sebagai pendiri partai Ishin, Toru Hashimoto, ia mengundurkan diri sebagai pemimpin partai digantikan oleh Yoriyisa Matsuno. Pemimpin baru Ishin mengambil langkah untuk bergabung dengan partai Demokrat namun hal tersebut membuat sebagian anggota partai tidak sepatutnya dengan keputusan tersebut. Langkah Matsuno berdampak pada pecahnya Ishin menjadi dua kubu yang berseberangan. Sebagian besar kubu yang dipimpin oleh Matsuno bergabung dengan DPJ pada

tahun 2016⁹. Sedangkan kubu yang dipimpin oleh Hashimoto yang jumlahnya tidak sebesar kubu Matsuno masih tetap bertahan dengan tidak ikut bergabung ke DPJ (Aoki, 2015).

Pada saat menghadapi pemilihan Gubernur di Tokyo, Yuriko Koike yang merupakan anggota partai LDP maju dalam pemilihan Gubernur tanpa dukungan dari LDP. Yuriko Koike mendapatkan dukungan yang berasal dari koalisi LDP yaitu Komeito dalam pemilihan Gubernur di Tokyo. Dukungan dari Komeito kemudian membuat Yuriko Koike membentuk sebuah partai lokal yang diberi nama *Tokyo Frist* dan memutuskan untuk hengkang dari LDP. Setelah Yuriko Koike memenangkan pemilihan Gubernur di Tokyo, Yuriko Koike memutuskan untuk mengubah partai lokal yang dibuat menjadi partai nasional. Yuriko Koike dan Masaru Wakasa yang merupakan anggota partai Demokrat kemudian membentuk partai Harapan (*Hope*) atau *Kibo no To* pada tahun 2017.

Pemilihan umum 2014 telah berhasil memecah belah kekuatan pihak oposisi. Partai oposisi sadar akan pentingnya bersatu untuk dapat mengalahkan dominasi LDP. Namun, partai-partai oposisi tidak pernah mendapatkan kesepakatan mengenai kepada siapa partai-partai oposisi harus bergabung untuk mengalahkan dominasi LDP. Tiga partai oposisi utama di tahun 2014 terpecah dan membentuk kekuatan baru namun bukan menjadi oposisi tangguh melawan partai pemerintah, justru sebaliknya semakin memecah kekuatan partai-partai itu sendiri.

3.2.2 Pemilihan umum Majelis Tinggi 2016

LDP dan koalisi memenangkan kembali pemilihan umum Majelis Tinggi pada bulan Juli 2016 setelah memperoleh 69 kursi dari 121 kursi yang diperebutkan (Osaki, 2016). Sebelumnya koalisi tersebut telah memenangkan dua pertiga pemilihan umum di Majelis Rendah pada tahun 2014 yang semakin memperkokoh posisi Abe sebagai Perdana Menteri. Kemenangan dua pertiga LDP

⁹Pada tahun 2016, DPJ yang dipimpin oleh pemimpin baru, Katsuya Okada, memutuskan untuk menggabungkan partainya dengan Ishin kubu Matsuno. Di tahun yang sama pada bulan Maret, untuk pertama kalinya dalam sejarah DPJ mengganti nama menjadi Demokrat (DP) yang merupakan hasil gabungan dari DPJ dan Ishin kubu Matsuno (Osaki, 2016).

di Majelis Tinggi semakin memantapkan langkah Abe untuk melakukan revisi konstitusi Jepang, terutama pasal 9. Meskipun pada saat berkampanye Abe tidak terlalu menitik beratkan pada revisi konstitusi, namun dengan adanya kontrol penuh di kedua majelis membuat Abe dekat dengan mimpi lamanya untuk merevisi konstitusi (Trihartono, 2016).

3.2.3 Pemilihan Gubernur Tokyo

Pemilihan Gubernur Tokyo yang berlangsung pada akhir bulan Juli 2017 dimenangkan oleh Yuriko Koike, yang merupakan anggota dari partai LDP. Meskipun Yuriko Koike adalah anggota dari partai LDP, ia memiliki pola berpikir yang berbeda dengan partai LDP. Sehingga pada saat pemilihan Gubernur Tokyo ia tidak mendapatkan dukungan dari LDP. Pada pemilihan Gubernur Tokyo, Yuriko Koike bertarung menghadapi kandidat resmi yang di usung oleh LDP dan kandidat lain yang didukung oleh partai-partai oposisi besar lainnya. Walaupun tidak mendapatkan dukungan dari LDP, Yuriko Koike berhasil mengalahkan kandidat-kandidat lain.

Dalam pemilihan Gubernur di Tokyo, Yuriko Koike mengkampanyekan reformasi dan pentingnya akan transparansi dalam pemerintahan (Foster, 2016). Visi dan misi yang dikampanyekan oleh Yuriko Koike merupakan sebuah kontradiksi yang terjadi dalam internal LDP. LDP yang dipimpin oleh Abe pada saat itu sedang terlibat berbagai skandal dan LDP berkali-kali menolak untuk memberikan dokumen mengenai catatan harian pasukan bela diri atau *Self Defense Force* (SDF) yang terlibat dalam misi perdamaian di Sudan kepada publik (Sieg & Lies, 2017). Tentu saja hal tersebut membuat Yuriko Koike tidak mendapatkan dukungan LDP pada saat dirinya maju pada pemilihan Gubernur Tokyo.

Hasil dari *exit poll*¹⁰ pada tahun 2016 yang memberitakan Yuriko Koike sebagai pemenang membuat partai Komeito mengalihkan dukungannya kepada

¹⁰*Exit Poll* merupakan sebuah metode survey yang dilakukan dengan cara mewawancarai pemilih setelah melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. *Exit Poll* berbeda dengan hitung cepat atau *Quick Count*. *Exit Poll* dilakukan dengan cara menanyakan secara

Yuriko Koike. Beralihnya dukungan Komeito dari LDP terjadi setelah Yuriko Koike menyatakan akan membangun sekolah politik “*seiji juku*” untuk melatih orang dalam berpolitik. Keputusan Yuriko Koike membangun sekolah politik adalah langkah awal dari pembentukan partai lokal baru *Tokyo Frist* dan meninggalkan LDP. Pindahnya dukungan Komeito kepada Yuriko Koike merupakan sejarah baru bagi Komeito. Sejak bergabung dengan LDP, Komeito banyak mengalami ketidak sepahaman dalam pembuatan kebijakan, namun tidak pernah mendukung kandidat maupun partai lain dalam pemilihan.

Yuriko Koike yang mendapatkan dukungan dari Komeito berhasil memenangkan pemilihan Gubernur di Tokyo dengan mengesankan setelah memperoleh 49 kursi dari 127 kursi yang diperebutkan mengalahkan LDP yang hanya memperoleh 23 kursi (Associated Press, 2017). Suara dukungan terhadap LDP dalam pemilihan Gubernur di Tokyo mengalami penurunan setelah pada *exit poll* LDP memperoleh 57 kursi. Hilangnya dukungan terhadap LDP dalam pemilihan Gubernur di Tokyo membuat Abe sebagai ketua LDP khawatir akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap LDP.

3.2.4 Pemilihan ketua partai LDP

Pada bulan Maret 2017 LDP mengubah kebijakan lama jabatan ketua umum partai yang semula enam tahun menjadi sembilan tahun (Osaki, 2016). Perubahan kebijakan tersebut menguntungkan Abe yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua partai sejak tahun 2012, karena masa jabatan Abe sebagai ketua partai yang akan berakhir pada tahun 2021. Keuntungan lain yang diperoleh dari perubahan kebijakan tersebut adalah adanya kemungkinan Abe tetap menjabat sebagai Perdana Menteri selama LDP memenangkan pemilihan umum di Majelis Rendah.

Abe masih menjadi sosok yang dominan dalam LDP. Kepiawaiannya Abe dalam mengelola permasalahan yang menerpa LDP membuat dirinya semakin ahli dalam berpolitik. Cara berpolitik Abe pada periode 2014-2017 sangat berbeda

langsung kepada pemilih (*voters*) tentang calon yang dipilih. Sedangkan *Quick Count* merupakan perhitungan hasil akhir perolehan suara pada tempat pemungutan suara.

dengan cara berpolitik Abe pada saat dirinya pertama kali menjadi Perdana Menteri pada tahun 2006. Abe semakin ahli dalam mengelola skandal yang menerpa LDP, strategi berkomunikasi semakin solid, dan Abe juga semakin lebih baik dalam menanggapi pemberitaan-pemberitaan media serta dapat mengelola elektabilitasnya tetap berada di posisi aman. Tindakan-tindakan politik yang dilakukan Abe semakin memperkuat posisinya sebagai ketua LDP (Bosack, 2018). Pergantian ketua partai LDP yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 nampaknya bukan menjadi masalah bagi Abe, karena meskipun ada kandidat lain yang mengajukan diri sebagai ketua partai, namun sosok Abe masih terlalu tangguh untuk dikalahkan dalam perebutan jabatan ketua partai.

3.2.5 Krisis keamanan di Jepang

Memanasnya hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan berimbas kepada stabilitas keamanan Jepang. Pada tahun 2017 tercatat Korea Utara telah melakukan uji coba misil jarak jauh sebanyak 15 kali dan dua kali mengarah langsung ke Jepang. Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik antar benua atau *intercontinental ballistic missiles* (ICBMs), *hwasong 12* yang mengarah ke Jepang pada tanggal 29 Agustus dan 15 September 2017 (Graham et al., 2017). Uji coba pertama pada bulan Agustus, misil *hwasong 12* menempuh jarak 2.700 kilometer melintasi langit Hokaido dan jatuh di Samudera Pasifik (BBC, 2017). Hanya berselang satu bulan, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik yang melintasi langit Jepang. Misil antar benua, *hwasong 12* diluncurkan dari Pyongyang menempuh jarak 3.400 kilometer melintasi langit Hokaido sebelum jatuh di perairan Guam¹¹.

Tindakan provokatif yang dilakukan Korea Utara terhadap Jepang pada tahun 2017 mengubah situasi perpolitikan dalam negeri Jepang. Abe menolak memberikan toleransi atas tindakan yang dilakukan Korea Utara terhadap Jepang.

¹¹Uji coba misil balistik antar benua Korea Utara pada bulan September merupakan uji coba yang sukses. *Hwasong 12* yang mengangkut sekitar 160 kiloton bahan peledak *Trinitrotoluena* (TNT) jatuh di wilayah perairan Guam. Sejak akhir abad ke-19 Guam berada di tangan Amerika Serikat. Guam merupakan pangkalan militer Amerika Serikat sejak perang dunia kedua hingga sekarang. Adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Guam memiliki peranan penting di kawasan Asia Pasifik.

Abe mendesak komunitas internasional untuk bersama sama memberikan tekanan kepada Korea Utara untuk menghentikan proram pengembangan nuklir yang dimilikinya. Kemampuan rudal balistik yang dimiliki oleh Korea Utara memberikan ancaman bagi negara-negara sekitar seperti Korea Selatan dan Jepang yang merupakan aliansi Amerika Serikat.

Menanggapi ancaman Korea Utara yang diarahkan ke Jepang, pada tanggal 25 September 2017 Abe, sebagai Perdana Menteri mengadakan konferensi pers dan menyatakan keputusannya membubarkan Majelis Rendah untuk mengadakan pemilihan umum. Dalam pernyataannya, Abe mengatakan provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai salah satu dari “*kokunan*” atau krisis nasional (Japan Kantei, 2017). Abe membenarkan bahwa keputusannya membubarkan Majelis Rendah dan mengadakan pemilihan umum sebagai cara meminta respon tanggapan masyarakat atas ancaman Korea Utara terhadap Jepang. Abe mengharapkan agar masyarakat lebih menekan pemerintahannya untuk meningkatkan tekan pada ancaman Korea Utara.

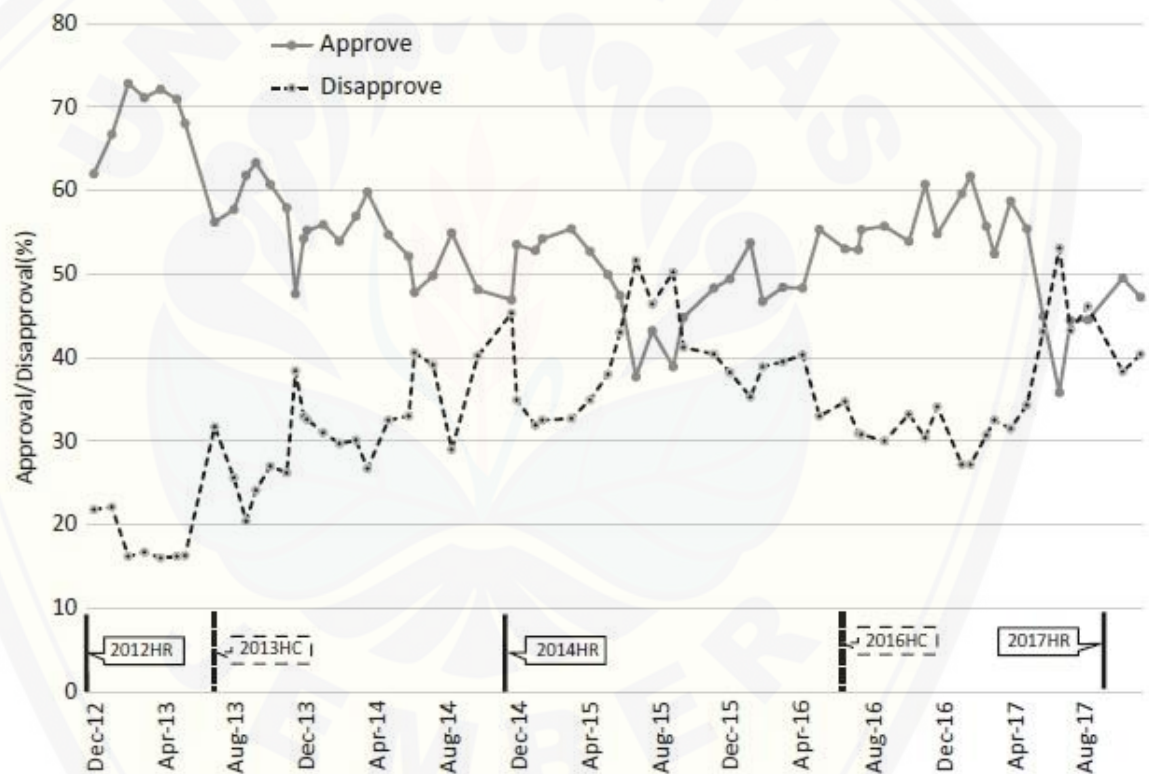
3.3 Elektabilitas Abe tahun 2014-2017

Elektabilitas merupakan angka kepercayaan atau ketertarikan terhadap tokoh atau partai politik. Dalam menjelang pemilihan umum, elektabilitas dapat dikatakan sebagai tolak ukur keterpilihan tokoh atau partai politik. Jika tokoh atau partai politik mendapatkan angka elektabilitas yang tinggi, maka ada kemungkinan tokoh atau partai politik tersebut akan dapat memperoleh banyak dukungan dalam pemilihan umum. Untuk mendapatkan angka elektabilitas yang tinggi, maka tokoh atau partai politik tersebut harus memiliki prestasi yang baik di hadapan masyarakat luas. Jika tokoh atau partai politik tidak dapat menunjukkan prestasinya, maka ia akan mendapatkan angka elektabilitas yang rendah. Sebagai konsekuensi dari rendahnya elektabilitas yang diterima adalah tokoh atau partai politik tersebut tidak akan dapat memperoleh dukungan dari masyarakat dalam pemilihan umum.

Dinamika perpolitikan yang terjadi di Jepang juga berdampak pada naik dan turunnya elektabilitas Abe sebagai Perdana Menteri. Pada saat Abe kembali

menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2012, elektabilitas Abe lebih dari 60 persen dan tercatat pernah mencapai angka diatas 70 persen. Namun kemudian perlahan-lahan elektabilitas Abe mengalami penurunan dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika perpolitikan yang terjadi. Meski elektabilitas Abe mengalami pasang surut, Abe dapat mengendalikan angka elektabilitasnya untuk tetap stabil. Kepiawaian Abe dalam mengelola isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat mampu mendongkrak eletabilitas Abe pada saat elektabilitasnya mengalami penurunan.

Grafik 3.1 Grafik elektabilitas kabinet Abe dari tahun 2012-2017



Sumber: Kyodo Opinion Poll

Grafik 3.1 menunjukkan bahwa Abe dapat mempertahankan rata-rata angka persetujuan kabinet yang Abe pimpin. Selama Abe menjabat sebagai Perdana Menteri, Abe pernah menerima dua kali angka penolakan yang lebih tinggi daripada angka persetujuan pada periode kedua sebagai Perdana Menteri. Angka penolakan terhadap kabinet Abe pada bulan Juli hingga September 2015 dan pada bulan Juli 2017. Penolakan terhadap kabinet Abe pada tahun 2015

bermula pada saat Abe melakukan revisi konstitusi terutama pada pasal 9 mengenai keamanan. Sedangkan penolakan kedua yang terjadi pada bulan Juli 2017 pada saat kabinet yang dipimpin oleh Abe diterpa isu skandal.

Revisi konstitusi pasal 9 yang dilakukan oleh Abe mengalami perdebatan yang sengit antar kedua Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Perdebatan mengenai revisi konstitusi juga memicu aksi demonstrasi hampir di seluruh wilayah Jepang (Traphagan, 2015). Media massa seperti surat kabar harian pun terbagi menjadi dua kubu dalam mendukung dan menentang kebijakan Abe¹². Surat kabar harian *Mainichi* sering mengadakan jajak pendapat opini publik mengenai revisi konstitusi pasal 9. Pada bulan Oktober 2015 sebanyak 57% masyarakat Jepang menolak adanya revisi, sementara 31% mendukung adanya revisi konstitusi pasal 9 (Japan, 2016). Dengan demikian masyarakat Jepang tidak sepatutnya dengan kebijakan Abe untuk melakukan revisi konstitusi pasal 9.

Penolakan kedua yang diterima oleh Abe pada bulan Juli hingga Agustus 2017 saat Abe diduga terlibat atas skandal penjualan tanah milik negara dengan memberikan harga murah kepada operator sekolah nasionalis *Moritomo Gakuken* yang memiliki hubungan dekat dengan istri Abe (Johnston, 2017). Penjualan aset negara yang sangat murah menuai banyak kecaman dari partai oposisi dalam *Diet*. Kecaman yang diterima Abe diduga karena adanya wacana untuk menjadikan istri Abe sebagai kepala sekolah untuk sekolah baru tersebut, tentu saja hal tersebut menimbulkan kecurigaan adanya perlakuan khusus yang dilakukan pihak pemerintah terhadap *Moritomo Gakuken* (McCurry, 2017).

3.4 *Reshuffle* Kabinet 2014-2017

Pada periode kedua sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2012, gaya kepemimpinan Abe mengalami perkembangan yang sangat pesat berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya pada tahun 2006. Abe segera mengganti anggota kabinetnya yang terlibat dalam skandal. Dalam *reshuffle* kabinet kedua, Abe menunjuk Midori Matsuhima dan Yuko Obuchi, dua wanita yang memiliki

¹²Surat kabar harian yang mendukung kebijakan Abe adalah *Yomiuri*, *Nikkei*, *Sankei*. Sedangkan surat kabar harian yang menentang kebijakan Abe adalah *Asahi*, *Mainichi*, *Tokyo*.

elektabilitas tinggi menjabat sebagai menteri dalam kabinetnya. Hal tersebut dilakukan Abe sebagai upaya memajukan posisi wanita di pemerintahan dan masyarakat (McCurry, 2014).

Midori Matsuhima mengundurkan diri dari jabatannya setelah partai oposisi mengajukan tuntutan pidana kepadanya. Pihak oposisi mengatakan bahwa tim sukses Midori Matsuhima telah melakukan penyalahgunaan dana politik dengan membagikan pamflet bertuliskan namanya kepada pemilih di distriknya (McCurry, 2014). Yuko Obuchi juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri karena adanya pengeluaran berlebihan yang dilakukan oleh kelompok pendukung politiknya (Yoshida, 2014). Abe merencanakan pengunduran kedua menteri wanita dalam kabinetnya untuk mengundurkan diri pada hari yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah berlarut larutnya skandal yang dialami oleh kedua menterinya yang dapat berdampak serius terhadap dukungan kabinet atau LDP.

Pada awal tahun 2016 Abe juga berhasil mempertahankan elektabilitasnya pada saat anggota kabinetnya, Akira Amari, terlibat dalam sebuah skandal. Akira Amari merupakan juru runding utama Jepang dalam *Trans Pacific Partnership* (TPP), akan tetapi sebuah skandal muncul ke permukaan setelah majalah mengungkap bahwa Akira Amari dan sekretarisnya menerima uang tunai dan hadiah yang dirahasiakan oleh sebuah perusahaan konstruksi (Inoue & Ueno Hisako, 2016). Akira Amari kemudian mengundurkan diri dari jabatannya seminggu setelah pemberitaan pertama muncul. Skandal yang dilakukan oleh Akira Amari segera hilang dari pemberitaan dan tidak memberikan dampak serius dukungan publik terhadap Kabinet Abe. Keterampilan Abe yang meningkat adalah salah satu alasan dia mampu mempertahankan elektabilitasnya dalam jajak pendapat dan layak menerima gelar “*master of public opinion*” (Maeda, 2018).

Setelah pemilu Majelis Tinggi pada tahun 2016, Abe kembali melakukan *reshuffle* kabinet untuk ketiga kalinya. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi, Sanae Takaichi, merupakan menteri pertama dalam *reshuffle* kabinet Abe yang terlibat dalam sebuah kontroversi setelah mengatakan bahwa pemerintah dapat menutup acara siaran televisi apabila menayangkan program

politik yang menyimpang (Osaki, 2016). Setelah mengklarifikasi dan menarik komentarnya, Abe masih terus mempertahankannya dalam kabinet. Pada April 2017, Masahiro Imamura, yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur karena bencana tsunami pada tahun 2011 terjadi di Tohoku bukan di ibu kota negara (Reuters, 2017). Abe segera bertindak dengan mengganti Masahiro Imamura keesokan harinya.

Dari serangkaian *reshuffle* kabinet yang dilakukan Abe, Tomomi Inada yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan merupakan anggota kabinet yang paling memalukan. Dalam kampanye pemilihan Majelis Tinggi, Tomomi Inada melakukan kampanye pada sebuah distrik dengan pangkalan militer dan meminta dukungan atas nama Kementerian Pertahanan, *Self Defense Force* (SDF), dan LDP (Reynolds, 2017). Skandal yang kemudian memaksa Inada mengundurkan diri pada bulan September ketika seorang jurnalis mengajukan permintaan pengungkapan catatan informasi harian SDF yang terlibat sebagai pasukan perdamaian PBB di Sudan Selatan (Sieg & Lies, 2017). Para jurnalis ingin melihat langsung catatan harian SDF dari bulan Juli 2016 pada saat perang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan memaksa menarik kedutaannya.

Partai oposisi menggunakan “catatan kontroversi” untuk menuduh pemerintah merahasiakan kondisi sebenarnya yang dialami oleh SDF. Skandal merahasiakan dokumen keamanan menjadi penyebab pengunduran Tomomi Inada, tetapi penyebab langsung dari skandal tersebut terlihat jelas dalam praktik birokrasi kementerian pertahanan dan praktik birokrasi di Jepang. Skandal yang menjerat Tomomi Inada tersebut memaksa Abe untuk turun tangan setelah dukungan padanya semakin mengalami penurunan. Pada bulan Agustus 2017 Abe kembali merombak kabinetnya, namun Abe lebih banyak memilih anggota dari pihak oposisi menjabat sebagai Menteri daripada anggota dari partainya sendiri.

Tindakan yang dilakukan Abe dengan memilih anggota partai oposisi untuk menjabat posisi Menteri dapat mengurangi tekanan dari pihak oposisi kepada pemerintah. Hal tersebut terbukti efektif dengan naiknya kembali elektabilitas kabinet Abe. Dengan berkurangnya tekanan pihak oposisi kepada pemerintahan, Abe dapat fokus menjalankan roda pemerintahan dan Abe dapat

memfokuskan dirinya menghadapi pemilihan presiden partai LDP. Semakin ahli Abe dalam mengatasi masalah, maka semakin kecil peluang lawan politik Abe mengalahkan Abe dalam memperebutkan kursi presiden partai. Semakin besar peluang Abe menjabat kembali sebagai presiden partai, maka semakin besar pula peluang Abe menjabat sebagai Perdana Menteri dengan syarat LDP harus menang dalam pemilihan umum Majelis Rendah.



BAB 5. KESIMPULAN

Pemilu biasanya diselenggarakan secara rutin dan terjadwal sesuai dengan kebijakan tiap negara. Namun, tidak menutup kemungkinan pemilu diselenggarakan lebih awal dari jadwal yang seharusnya apabila sedang terjadi krisis politik dalam negeri atau pemimpin yang sedang berkuasa diturunkan dari jabatannya secara paksa. Sebagai Perdana Menteri Jepang, Abe memiliki hak untuk membubarkan *Diet* untuk melaksanakan pemilihan umum. Keputusan Abe membubarkan *Diet* pada 28 September 2017 dan melaksanakan pemilihan umum Majelis Rendah pada 22 Oktober 2017 didasari oleh beberapa faktor.

Pertama, kekuatan oposisi yang melemah. Abe memanfaatkan perpecahan internal partai oposisi untuk mengadakan pemilihan umum Majelis Rendah setahun lebih awal dari jadwal pemilihan umum yang seharusnya diselenggarakan pada akhir tahun 2018. Abe sadar bahwa saat ini partainya mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat setelah dirinya dan beberapa menteri dalam kabinetnya terlibat dalam skandal.

Kedua, elektabilitas Abe yang mengalami peningkatan. Setelah beberapa skandal yang melibatkan Abe dan beberapa menteri dalam kabinetnya, Abe melakukan *reshuffle* terhadap beberapa menternya yang terlibat dalam skandal yang mengakibatkan elektabilitas Abe dan LDP mengalami penurunan. Turunnya elektabilitas Abe berdampak pada kalahnya LDP dalam pemilihan Gubernur di Tokyo pada bulan Juli 2017. Sebagai ketua partai LDP, Abe tidak ingin mengulang lagi kekalahan LDP seperti yang terjadi pada tahun 2009, Abe segera mengganti menternya yang terlibat dalam skandal berdampak pada naiknya elektabilitas Abe. Naiknya elektabilitas Abe setelah melakukan *reshuffle* terhadap menternya yang terlibat skandal dimanfaatkan oleh Abe untuk melaksanakan pemilihan umum lebih awal.

Ketiga, krisis keamanan yang dialami oleh Jepang sebagai akibat memanasnya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan dimanfaatkan oleh Abe untuk mempercepat pemilihan umum. Uji coba rudal balistik yang dilakukan Korea Utara telah melintasi langit Jepang sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan

memicu sirine keamanan Jepang. Masyarakat Jepang yang masih trauma atas jatuhnya bom atom yang menghancurkan Jepang pada perang dunia ke II menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Abe merespon keresahan yang dialami oleh masyarakat Jepang dengan memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal. Meskipun cara Abe merespon keresahan masyarakat mengalami pro dan kontra, Abe menyatakan bahwa dirinya membutuhkan legitimasi dari masyarakat. Masa jabatan Abe sebagai Perdana Menteri yang masih tersisa satu tahun dirasa masih kurang kuat untuk membuat kebijakan mengatasi krisis keamanan yang terjadi. Abe memutuskan untuk membubarkan *Diet* dan mengadakan pemilihan umum lebih awal dari jadwal yang semestinya dilaksanakan pada tahun 2018.

Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa keputusan Abe mengadakan pemilihan umum lebih awal adalah adanya kemungkinan memenangkan pemilihan umum jika dilaksanakan lebih awal. Abe memanfaatkan momentum perpolitikan dalam negeri yang sedang terjadi. Naiknya elektabilitas Abe, partai oposisi yang terpecah dan tindakan provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Jepang menjadi momentum untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal. Sebaliknya, jika elektabilitas Abe tidak mengalami peningkatan, partai oposisi tidak terpecah, dan tidak ada tindakan provokasi dari Korea Utara ada kemungkinan Abe akan melangsungkan pemilihan umum sesuai jadwal yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arend Lijpart (Disadur oleh Ibrahim et.al), *Sistem Pemerintahan Parlemerter dan Presidensil*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Constituteproject, 2013. Japan's Constitution of 1946.
- Governance, L., Making, P. & Society, C., 2007. Election System in Japan. Regulation.
- Haruhiro Fukui, "Japan's Government", Encyclopedia Americana , (Connecticut: Scholastic Library Publishing, Inc, 2004).
- Hrebenar, R.J. & Nakamura, A., 2015. Party politics in Japan R. J. Hrebenar & A. Nakamura, eds.
- Hughes, Christopher. 2009. 'Supersizing' the DPRK Threat: Japan's Evolving Military Posture and North Korea. Asian Survey 49 (2).
- Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dan Dalam Sejarah : TelaahPerbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. UI Press, Jakarta, 1997.
- Kingston, J., 2013. Contemporary Japan 2nd ed. K. Robbins, ed.
- Law Library of Congress. 2015. Japan: Interpretations of Article 9 of the Constitution. Washington, DC: Library of Congress.
- Maeda, Yukio. 2018. Public Opinion and the Abe Cabinet: Alternating Valence and Position Issues. dalam Japan Decides 2017: The Japanese General Election, ed.
- Masuyama, M. & Nyblade, B., 2004. Japan: the prime minister and the Japanese Diet. The Journal of Legislative Studies.
- Ranjit, K., 2011. RESEARCH METHODOLOGY a step-by-step guide for beginners 3rd ed., Chennai.
- Robert J. Pekkanen, Steven R. Reed, Ethan Scheiner, and Daniel M. Smith, New York: Palgrave Macmillan.
- Takenaka, Heizo. 2010. "Hatoyama naikaku no niyu jinkaku seisaku ga Nihon no hayyoku o maneku" (Disturbing developments under the DPJ). Chuo Koron.
- Taniguchi, Masaki, Uenohara Hideaki and Sakaiya Shiro. 2009. "2009 nen sosenkyo: Dare ga Jiminto seiken o awaraseta no ka?" (Who ended the LDP's reign?), Seikai.

Tian, Nan, Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman, and Siemon T. Wezeman. 2017. Trends in World Military Expenditure, 2016. In SIPRI Fact Sheet. Solna, Sweden: Stockholm International Peace Research Institute.

Walt, S.M., 1999. Rigor or Rigor Mortis ? Rational Choice and Security Studies..

Jurnal dan Artikel

Lorenzo, C., 2015. Japan's Prime Minister wins his electoral bid. , (January).

Mochizuki, M.M. & Porter, S.P., 2013. Japan under Abe : toward Moderation or Nationalism ?

Nagy, B.S.R., 2017. Japan faces a consequential decision in possible snap election.

Tribune, 2017. Abe vows to tackle North Korea threat ahead of Japan election.

Yoshida, R., 2017. Abe poised to dissolve Lower House for snap general election, Governance, L., Making, P. & Society, C., 2007. Election System in Japan 選挙制度. Regulation.

Internet

Aoki, M., 2015. Leaders of DPJ, Ishin no To to test unity with joint parliamentary group. <https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/07/national/politics-diplomacy/leaders-of-dpj-ishin-no-to-to-test-unity-with-joint-parliamentary-group/#.W2SGf6KVBxI> [Diakses pada 3 Agustus 2018].

Aoki, M. & Yoshida, R., 2015. Okada defeats Hosono to win DPJ presidential election. <https://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/18/national/politics-diplomacy/okada-defeats-hosono-win-dpj-leadership-election/#.W8dM2aI3JxI> [Diakses pada 17 Oktober 2018].

Aoki, M., 2017. Ministry disciplines seven bureaucrats over “amakudari” corruption scandal. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/20/national/ministry-disciplines-seven-bureaucrats-amakudari-corruption-scandal/#.W7i25qI3JxJ> [Diakses pada 6 October 2018].

Asia Pacific Foundation of Canada, 2017. Neither Populism nor Drift: Japan’s October 2017 Election. <https://www.asiapacific.ca/fr/canada-asia-agenda/neither-populism-nor-drift-japans-october-2017-election> [Diakses pada 31 Januari 2018].

- Associated Press, 2017. A local election in Tokyo may have just changed Japanese politics. <http://www.latimes.com/world/la-fg-japan-tokyo-election-20170702-story.html> [Diakses pada 7 Agustus 2018].
- Azimi, N., 2010. An Admirable Culture of Shame. <https://www.nytimes.com/2010/06/08/opinion/08iht-edazimi.html> [Diakses pada 15 Agustus 2018].
- BBC, 2017. North Korea fires second ballistic missile over Japan. <https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41275614> [Diakses pada 10 Agustus 2018].
- Bosack, M., 2018. LDP 2018 Preview: Elections. <http://www.tokyoreview.net/2018/01/ldp-2018-preview-elections/> [Diakses pada 9 Agustus 2018].
- Bureau, S. & Japan, M. of I.A. and C., 2016. Statistical Handbook Of Japan. <http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm>. [Diakses pada 10 Juli 2018].
- Demetriou, D., 2017. Japanese opposition abolishes itself in risky attempt to force out Shinzo Abe. <https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/28/political-upset-japan-opposition-funnels-candidates-new-party/> [Diakses pada 18 Oktober 2018].
- Fackler, Martin. 2014. "Calling Early Elections in Japan, Abe Rolls the Dice on the Economy." <http://www.nytimes.com/2014/11/19/world/asia/prime-minister-shinzo-abe-calls-for-early-elections-in-japan.html>. [Diakses pada 18 November 2018].
- Foster, M., 2016. Tokyo elects first female governor. <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/31/tokyo-elects-first-female-governor> [Diakses pada 7 Agustus 2018].
- Fujioka, C., 2007. New scandal hits Japan cabinet as parliament opens. <https://www.reuters.com/article/us-japan-politics/new-scandal-hits-japan-cabinet-as-parliament-opens-idUST1560820070807> [Diakses pada 11 Juli 2018].
- Graham, C., Boyle, D. & Connor, N., 2017. North Korea fires second missile over Japan as US tells China and Russia to take "direct action." <https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/14/north-korea-files-another-ballistic-missile-japan-residents/> [Diakses pada 9 Agustus 2018].
- Hays, jeffrey, 2013. LOCAL GOVERNMENT IN JAPAN. <http://factsanddetails.com/japan/cat22/sub146/item2786.html> [Diakses pada 23 Juli 2018].
- Hermansyah, 2015. Di Jepang, Hakim PA Wonosari Belajar Mediasi. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar->

- ditjen-badilag/di-jepang-hakim-pa-wonosari-belajar-mediasi [Diakses pada 6 Mei, 2018].
- Inoue, M. & Ueno Hisako, 2016. Akira Amari, Japan's Economic Revitalization Minister, Resigns Amid Scandal. <https://www.nytimes.com/2016/01/29/world/asia/japan-akira-amari-resigns.html> [Diakses pada 11 Juli, 2018].
- Japan Times, 2017. Abe's hardly convincing reason for snap election. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/09/26/editorials/abes-hardly-convincing-reason-snap-election/#.WqaJtKKVBxI> [Diakses pada 12 Maret 2018].
- Japan, M., 2016. Abe Cabinet approval rate dives 9 points to 42%. <https://mainichi.jp/english/articles/20160307/p2a/00m/0na/007000c> [Diakses pada 10 Juli 10, 2018].
- Japan Kantei, 2017. Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe (Speeches and Statements by the Prime Minister). https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201709/_00011.html [Diakses pada 14 Agustus 2018].
- Johnston, E., 2017. Moritomo Gakuen scandal another history Japan's nationalists may wish to rewrite. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/26/national/moritomo-gakuen-scandal-another-history-japans-nationalists-may-wish-rewrite/#.W0S-pKKVBxI> [Diakses pada 10 Juli 2018].
- Japan Cabinet Office, 2017. Overview of the Public Opinion Survey on Social Awareness, 1975 (March), p.28. <https://www.gov-online.go.jp/eng/pdf/summaries16.pdf>. [Diakses pada 10 Juli 2018].
- Johnston, E., 2017. Kibo no To and Osaka's Nippon Ishin in cautious collaboration with wide policy overlap. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/06/national/politics-diplomacy/kibo-no-osakas-nippon-ishin-cautious-collaboration-wide-policy-overlap/#.W8eYtKI3JxI> [Diakses pada 18 Oktober 2018].
- Katsuyuki, Y., 2013. Election 2013: Promise and Perils of an LDP Landslide. <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2013/election-2013> [Diakses pada 1 Agustus 2018].
- Katsuyuki, Y., 2014. Japan Perspectives. In A. Imai, ed. Tokyo: Masahiro Akiyama. www.tokyofoundation.org/en. [Diakses pada 9 Juli 2018].
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Explore Japan. [id.emb-japan.go.jp](http://www.id.emb-japan.go.jp). http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_13.html [Diakses pada 2 Mei 2018].
- Khan, S.A., 2012. LDP "Take(s) Back Japan": The creation of a national military is on Abe's agenda.

- https://idsa.in/issuebrief/LDPTakeBackJapan_sakhan_261212 [Diakses pada 26 November 2018].
- Kyodo, 2017. Cabinet's flat support rating surpassed by disapproval rating in latest poll.
<https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/03/national/politics-diplomacy/latest-poll-finds-support-rate-abe-cabinet-virtually-unchanged-44-5/#.W50NHKKVBxI> [Diakses pada 15 September 2018].
- McCurry, J., 2017. Shinzo Abe and wife under pressure over ties to ultra-nationalist school.
<https://www.theguardian.com/world/2017/feb/24/shinzo-abe-wife-akie-under-pressure-ties-ultra-nationalist-school-japan> [Diakses pada 10 Juli 2018].
- McCurry, J., 2014. Two Japanese ministers quit after financial allegations.
<https://www.theguardian.com/world/2014/oct/20/japans-trade-minister-yuko-obuchi-quits> [Diakses pada 11 Juli 2018].
- Meltzer, J. p., 2013. Japan to Join the Trans-Pacific Partnership – Finally!
<https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/03/18/japan-to-join-the-trans-pacific-partnership-finally/> [Diakses pada 14 Agustus 2018].
- Merler, S., 2018. Abenomics, five years in: Has it Works?
<https://www.weforum.org/agenda/2018/01/abenomics-five-years-in-has-it-worked> [Diakses pada 1 Agustus 2018].
- Mainichi, 2017. Ex-education ministry official clashes with PM's office over docs on school plans.
<https://mainichi.jp/english/articles/20170526/p2a/00m/0na/019000c> [Diakses pada 3 Oktober 2018].
- Martin, A., 2017. Voters question Abe's decision to call snap election.
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/26/national/politics-diplomacy/voters-mixed-abes-decision-call-snap-election/#.W_wOO6I3JxI [Diakses pada 26 November 2018].
- McCurry, J., 2014. Japan PM to overturn pacifist defence policy.
<https://www.theguardian.com/world/2014/jun/30/japan-pm-overturn-pacifist-defence-policy-shinzo-abe> [Diakses pada 26 November 2018].
- McElwain & Mori, K., 2017. The Anomalous Life of the Japanese Constitution |
<https://www.nippon.com/en/in-depth/a05602/> [Diakses pada 26 November 2018].
- Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015. What's the Abductions Issue?
https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page1we_000067.html [Diakses pada 23 November 2018].

- Nikkei, 2017. Haste may make waste for Koike's new party. <https://asia.nikkei.com/Politics/Haste-may-make-waste-for-Koike-s-new-party2> [Diakses pada 3 Agustus, 2018].
- Nippon, 2017. Abe Reshuffles Cabinet in Bid to Reverse Slumping Approval. <https://www.nippon.com/en/features/h00167/> [Diakses pada 26 November 2018].
- Osaki, T., 2016. DPJ, Ishin seal merger, will create new opposition party in March. <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/26/national/politics-diplomacy/dpj-ishin-seal-merger-will-create-new-opposition-party-march/#.W2b6HKKVBxI> [Diakses pada 5 Agustus 2018].
- Osaki, T., 2016. In boon for Abe, LDP officially signs off on extending president's term <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/26/national/politics-diplomacy/boon-abe-ldp-officially-signs-off-extending-presidents-term/#.W2r256KVBxI> [Diakses pada 8 Agustus 2018].
- Osaki, T., 2016. Ruling bloc retains majority in Japan's Upper House election. <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/11/national/politics-diplomacy/ruling-bloc-wins-big-in-upper-house/#.W2hZtaKVBxI> [Diakses pada 6 Agustus 2018].
- Osaki, T., 2016. Sanae Takaichi warns that government can shut down broadcasters it feels are biased. <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/09/national/politics-diplomacy/minister-warns-that-government-can-shut-down-broadcasters-it-feels-are-biased/#.W0iKo6KVAm0> [Diakses pada 13 Juli 2018].
- Osaki, T., 2017. Abe moves to distance himself from Osaka school after praising principal's ideology. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/27/national/politics-diplomacy/abe-moves-distance-osaka-school-praising-principals-ideology/#.W6PBhaKVBxI> [Diakses pada 20 September 2018].
- Osaki, T., 2017. Abe tops Ishiba in Liberal Democratic Party election and secures historic third term. <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/09/20/national/politics-diplomacy/abe-tops-ishiba-liberal-democratic-party-election-secures-historic-third-term-power/#.W8Xct6I3JxI> [Diakses pada 16 Oktober 2018].
- Osaki, T., 2016. Sanae Takaichi warns that government can shut down broadcasters it feels are biased. <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/09/national/politics-diplomacy/minister-warns-that-government-can-shut-down-broadcasters-it-feels-are-biased/#.W0iKo6KVAm0> [Diakses pada 13 Juli 2018].

- Osaki, T., 2017. Yuriko Koike's Party of Hope vows to alter Japan's political landscape. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/27/national/politics-diplomacy/yuriko-koike-new-party-take-ldp-vowing-alter-japans-political-landscape/#.W8ddiKI3JxI> [Diakses pada 17 Oktober 2018].
- Osaki, Y. & Yoshida Reiji, 2017. In sworn testimony, Kagoike says he got ¥1 million in envelope during Akie Abe's visit. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/23/national/politics-diplomacy/principal-scandal-hit-osaka-school-says-got-donation-akie-abe/#.W6tWYKKVBxJ> [Diakses pada 26 September 2018].
- Polimann, M., 2017. Abe's LDP Loses Big in Tokyo Metropolitan Elections: Why That Matters. <https://thediplomat.com/2017/07/abes-ldp-loses-big-in-tokyo-metropolitan-elections-why-that-matters/> [Diakses pada 16 Oktober 2018].
- Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2017. Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe (Speeches and Statements by the Prime Minister). https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201709/_00011.html [Diakses pada 26 November 2018].
- Reuters, 2017. Japan minister quits after saying it was "better" tsunami hit the north of country. <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/26/japan-reconstruction-minister-quits-after-inappropriate-comment-on-disaster-zone> [Diakses pada 13 Juli 2018].
- Reynolds, I., 2017. Japan's Defense Minister Inada Resigns Over Military Cover-Up. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-27/japan-s-defense-minister-to-resign-over-cover-up-nhk-reports> [Diakses pada 13 Juli, 2018].
- Repeta, L., 2017. Backstory to Abe's Snap Election – the Secrets of Moritomo, Kake and the "Missing" Japan SDF Activity Logs. <https://apjff.org/2017/20/Repeta.html> [Diakses pada 20 September 2018].
- Reuters, 2017. Japan minister quits after saying it was "better" tsunami hit the north of country. <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/26/japan-reconstruction-minister-quits-after-inappropriate-comment-on-disaster-zone> [Diakses pada 13 Juli 2018].
- Sang Hun, C. & E.Sanger David, 2017. North Korea Fires Missile Over Japan. <https://www.nytimes.com/2017/08/28/world/asia/north-korea-missile.html> [Diakses pada 2 April 2018].
- Sato, N., 2015. 2014 House of Representatives General Election in Japan. <http://www.cpg-online.de/2015/01/01/2014-house-of-representatives-general-election-in-japan/> [Diakses pada 1 Agustus 2018].

- Sieg, L., 2016. Japan opposition parties to merge with eye on July election. <https://www.reuters.com/article/us-japan-politics-opposition-idUSKCN0VZ0XD> [Diakses pada 3 Agustus 2018].
- Sieg, L. & Lies, E., 2017. Japan defense minister quits amid plunging support for PM. <https://www.reuters.com/article/us-japan-politics/japan-defense-minister-quits-amid-plunging-support-for-pm-idUSKBN1AD07L> [Diakses pada 13 Juli 2018].
- Sim, W., 2017. Yukio Edano stands up as the leader of Japan's biggest opposition, East Asia News & Top Stories. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/yukio-edano-stands-up-as-the-leader-of-japans-biggest-opposition> [Diakses pada 3 Agustus, 2018].
- Sieg, L. & Lies, E., 2017. Japan defense minister quits amid plunging support for PM. <https://www.reuters.com/article/us-japan-politics/japan-defense-minister-quits-amid-plunging-support-for-pm-idUSKBN1AD07L> [Diakses pada 13 Juli 2018].
- Smith, S., 2014. Reinterpreting Japan's Constitution. <https://www.forbes.com/sites/sheilaasmith/2014/07/03/reinterpreting-japans-constitution/#3ea36f6a463d> [Diakses pada 26 November 2018].
- Straitstimes, 2017. Foreign policy, security issues top LDP candidates' focus in Japan polls, East Asia News & Top Stories. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/foreign-policy-security-issues-top-ldp-candidates-focus-in-japan-polls> [Diakses pada 26 November 2018].
- Straitstimes, 2017. Japan PM Shinzo Abe begins new term with vow to increase North Korea pressure, East Asia News & Top Stories. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-pm-shinzo-abe-begins-new-term-with-vow-to-increase-north-korea-pressure> [Diakses pada 26 November 2018].
- Tabuchi, H., 2014. For First Time in Years, a Raise for Many Japanese Workers <https://www.nytimes.com/2014/03/13/business/international/toyota-to-increase-wages-for-employees.html> [Diakses pada 31 Juli 2018].
- Tatsumi, Y. & Centre, S., 2017. The costs of constitutional reform in Japan. <http://www.eastasiaforum.org/2017/09/27/the-costs-of-constitutional-reform-in-japan/> [Diakses pada 26 November, 2018].
- The Asahi Shimbun, 2017. EDITORIAL: Abe attempting to escape from scandals with call for election. <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201709180021.html> [Diakses pada 25 September 2018].
- The Asahi Shimbun, 2017. VOTE 2017: Koike apologizes for actions that may have hurt her Hope party.

- <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201710220042.html> [Diakses pada 18 Oktober 2018].
- The Japan Times, 2017. Clear up Kake Gakuen suspicions. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/05/24/editorials/clear-kake-gakuen-suspicions/#.W7TEXqKVBxI> [Diakses pada 3 Oktober 2018].
- The Japan Times, 2017. Unanswered Kake Gakuen questions. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/06/02/editorials/unanswered-kake-gakuen-questions/#.W_wbLKI3JxI [Diakses pada 26 November 2018].
- The Mainichi, 2017. “Battle against political powers” proves effective for Koike. <https://mainichi.jp/english/articles/20160801/p2a/00m/0na/014000c> [Diakses pada 18 Oktober 2018].
- The Mainichi, 2017. Maehara slammed by own party members for “destroying” largest opposition force. <https://mainichi.jp/english/articles/20171002/p2a/00m/0na/023000c> [Diakses pada 18 October 2018].
- The Mainichi, 2017. PM Abe dissolves lower house for snap election. <https://mainichi.jp/english/articles/20170928/p2a/00m/0na/010000c> [Diakses pada 26 November 2018].
- The Mainichi, 2017. Polls on Abe’s desire to revise Article 9 of Constitution produce mixed results. <https://mainichi.jp/english/articles/20170522/p2a/00m/0na/009000c> [Diakses pada 26 November 2018].
- The Mainichi Japan, 2017. Ex-bureaucrat slams decision-making process over Kake Gakuen school. <https://mainichi.jp/english/articles/20170710/p2a/00m/0na/017000c> [Diakses pada 10 Oktober 2018].
- The Straitstimes, 2017. Japan PM Shinzo Abe praises potential rival Fumio Kishida after Cabinet shakeup. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-pm-shinzo-abe-praises-potential-rival-fumio-kishida-after-cabinet-shakeup> [Diakses pada 26 November 2018].
- Traphagan, J.W., 2015. Demonstrating for Peace in Japan. <https://thediplomat.com/2015/07/demonstrating-for-peace-in-japan/> [Diakses pada 10 Juli 2018].
- Trihartono, A., 2016. Akankah Jepang Kembali ke Jalan Samurai? <http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-29/1/2> [Diakses pada 16 Agustus 2018].
- Web Japan, 1947. Governmental structure. Web Japan, pp.1–4. Available at: <http://web-japan.org/>. [Diakses pada 10 Juli 2018].

- Wong, M.E., 2000. Systems of Government in Some Foreign Countries: Singapore. <http://legco.gov.hk>. [Diakses pada 10 Juli 2018].
- Wright, J., 2018. Constitutional Revision: A (Tiny) Step Forward for Japan's Self-Defense Forces. <https://thediplomat.com/2018/08/constitutional-revision-a-tiny-step-forward-for-japans-self-defense-forces/> [Diakses pada 26 November 2018].
- Yoshida, R., 2014. Obuchi scandal bad omen for Abe | The Japan Times. Japan Times. <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/18/national/politics-diplomacy/obuchi-scandal-bad-omen-abe/#.W0YWXXKKVBxI> [Diakses pada 11 Juli 2018].
- Yoshida, R., 2017. Main opposition chief Renho resigns Democratic Party leadership. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/27/national/politics-diplomacy/main-opposition-chief-renho-resigns-dp-leadership/#.W5UipaKVBxI> [Diakses pada 9 September 2018].

LAMPIRAN





constituteproject.org

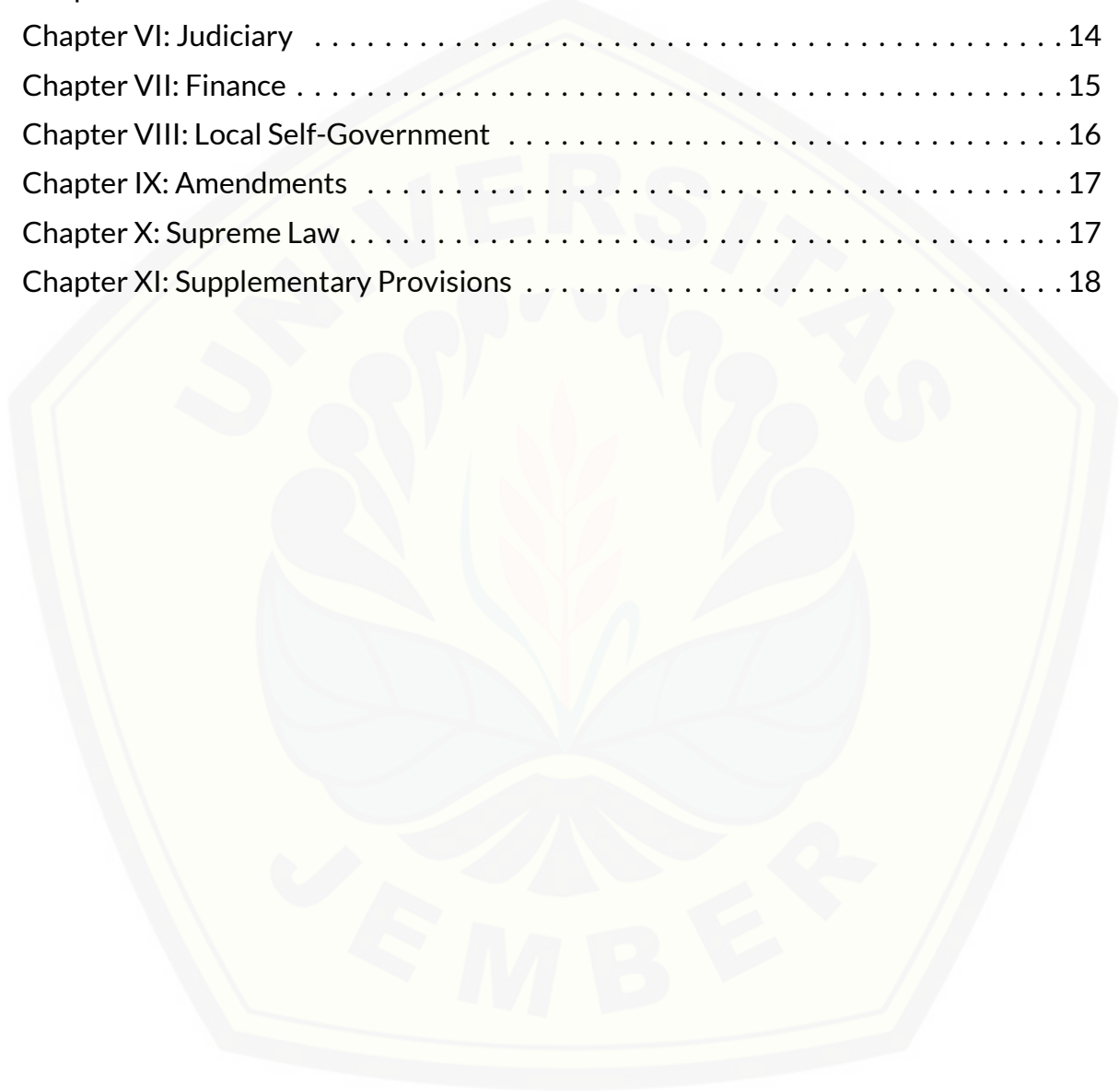
Japan's Constitution of 1946



This complete constitution has been generated from excerpts of texts from the repository of the Comparative Constitutions Project, and distributed on constituteproject.org.

Table of contents

Preamble	3
Chapter I: The Emperor	3
Chapter II: Renunciation of War	4
Chapter III: Rights and Duties of the People	5
Chapter IV: The Diet	9
Chapter V: The Cabinet	12
Chapter VI: Judiciary	14
Chapter VII: Finance	15
Chapter VIII: Local Self-Government	16
Chapter IX: Amendments	17
Chapter X: Supreme Law	17
Chapter XI: Supplementary Provisions	18



Preamble

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.

We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.

We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.

We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.

Chapter I: The Emperor

Article 1

The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the People, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.

Article 2

The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.

Article 3

The advice and approval of the Cabinet shall be required for all acts of the Emperor in matters of state, and the Cabinet shall be responsible therefor.

Article 4

The Emperor shall perform only such acts in matters of state as are provided for in this Constitution and he shall not have powers related to government.

The Emperor may delegate the performance of his acts in matters of state as may be provided by law.

Article 5

When, in accordance with the Imperial House Law, a Regency is established, the Regent shall perform his acts in matters of state in the Emperor's name. In this case, paragraph one of the preceding article will be applicable.

Article 6

The Emperor shall appoint the Prime Minister as designated by the Diet. The Emperor shall appoint the Chief Judge of the Supreme Court as designated by the Cabinet.

Article 7

The Emperor, with the advice and approval of the Cabinet, shall perform the following acts in matters of state on behalf of the people:

- Promulgation of amendments of the constitution, laws, cabinet orders and treaties.
- Convocation of the Diet.
- Dissolution of the House of Representatives.
- Proclamation of general election of members of the Diet.
- Attestation of the appointment and dismissal of Ministers of State and other officials as provided for by law, and of full powers and credentials of Ambassadors and Ministers.
- Attestation of general and special amnesty, commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights.
- Awarding of honors.
- Attestation of instruments of ratification and other diplomatic documents as provided for by law.
- Receiving foreign ambassadors and ministers.
- Performance of ceremonial functions.

Article 8

No property can be given to, or received by, the Imperial House, nor can any gifts be made therefrom, without the authorization of the Diet.

Chapter II: Renunciation of War

Article 9

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

Chapter III: Rights and Duties of the People

Article 10

The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.

Article 11

The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.

Article 12

The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

Article 13

All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

Article 14

All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.

Peers and peerage shall not be recognized.

No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

Article 15

The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.

All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.

Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public officials.

In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. A voter shall not be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

- Requirements for birthright citizenship

- Inalienable rights

- Duty to obey the constitution

- Right to life

- General guarantee of equality
- Equality regardless of gender
- Equality regardless of creed or belief
- Equality regardless of social status
- Equality regardless of origin
- Equality regardless of race

- Inalienable rights

- Claim of universal suffrage

- Secret ballot

Article 16

Every person shall have the right of peaceful petition for the redress of damage, for the removal of public officials, for the enactment, repeal or amendment of laws, ordinances or regulations and for other matters; nor shall any person be in any way discriminated against for sponsoring such a petition.

Article 17

Every person may sue for redress as provided by law from the State or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.

Article 18

No person shall be held in bondage of any kind. Involuntary servitude, except as punishment for crime, is prohibited.

Article 19

Freedom of thought and conscience shall not be violated.

Article 20

Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.

No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.

The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

Article 21

Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.

No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

Article 22

Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.

Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.

Article 23

Academic freedom is guaranteed.

- Right of petition

- Prohibition of slavery

- Freedom of opinion/thought/conscience

- Freedom of religion

- Separation of church and state

- Freedom of press

- Freedom of assembly
- Freedom of association
- Freedom of expression

- Right to choose occupation

- Right to renounce citizenship
- Freedom of movement
- Inalienable rights

- Right to academic freedom

Article 24

Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.

With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.

Article 25

All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health.

Article 26

All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.

All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. Such compulsory education shall be free.

Article 27

All people shall have the right and the obligation to work.

Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.

Children shall not be exploited.

Article 28

The right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.

Article 29

The right to own or to hold property is inviolable.

Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.

Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.

Article 30

The people shall be liable to taxation as provided by law.

Article 31

No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.

- Provision for matrimonial equality

- Human dignity

- Right to reasonable standard of living

- Right to health care

- Compulsory education
- Free education

- Right to work
- Duty to work
- Right to reasonable standard of living

- Rights of children
- Limits on employment of children

- Right to join trade unions

- Inalienable rights
- Right to own property

- Protection from expropriation

- Duty to pay taxes

- Prohibition of capital punishment
- Right to life

Article 32

No person shall be denied the right of access to the courts.

Article 33

No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent judicial officer which specifies the offense with which the person is charged, unless he is apprehended, the offense being committed.

Article 34

No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.

Article 35

The right of all persons to be secure in their homes, papers and effects against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon warrant issued for adequate cause and particularly describing the place to be searched and things to be seized, or except as provided by Article 33.

Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer.

Article 36

The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.

Article 37

In all criminal cases the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial tribunal.

He shall be permitted full opportunity to examine all witnesses, and he shall have the right of compulsory process for obtaining witnesses on his behalf at public expense.

At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the State.

Article 38

No person shall be compelled to testify against himself.

Confession made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention shall not be admitted in evidence.

No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.

• Protection from unjustified restraint

• Regulation of evidence collection

• Prohibition of cruel treatment
• Prohibition of torture

• Right to fair trial
• Right to public trial
• Right to speedy trial

• Right to examine evidence/ witnesses

• Right to counsel

• Protection from self-incrimination

Article 39

No person shall be held criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall he be placed in double jeopardy.

Article 40

Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or detained, may sue the State for redress as provided by law.

Chapter IV: The Diet

Article 41

The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.

Article 42

The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.

Article 43

Both Houses shall consist of elected members, representative of all the people.

The number of the members of each House shall be fixed by law.

Article 44

The qualifications of members of both Houses and their electors shall be fixed by law. However, there shall be no discrimination because of race, creed, sex, social status, family origin, education, property or income.

Article 45

The term of office of members of the House of Representatives shall be four years. However, the term shall be terminated before the full term is up in case the House of Representatives is dissolved.

Article 46

The term of office of members of the House of Councillors shall be six years, and election for half the members shall take place every three years.

Article 47

Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.

- Prohibition of double jeopardy
- Protection from ex post facto laws
- Principle of no punishment without law

- Protection from false imprisonment

- Structure of legislative chamber(s)

- Size of first chamber
- Size of second chamber

- Eligibility for first chamber
- Eligibility for second chamber

- Term length for first chamber

- Term length of second chamber

- Electoral districts
- First chamber selection
- Second chamber selection

Article 48

No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.

Article 49

Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.

Article 50

Except in cases provided by law, members of both Houses shall be exempt from apprehension while the Diet is in session, and any members apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of the session upon demand of the House.

Article 51

Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes cast inside the House.

Article 52

An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.

Article 53

The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation.

Article 54

When the House of Representatives is dissolved, there must be a general election of members of the House of Representatives within forty (40) days from the date of dissolution, and the Diet must be convoked within thirty (30) days from the date of the election.

When the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is closed at the same time. However, the Cabinet may in time of national emergency convoke the House of Councillors in emergency session.

Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall be provisional and shall become null and void unless agreed to by the House of Representatives within a period of ten (10) days after the opening of the next session of the Diet.

Article 55

Each House shall judge disputes related to qualifications of its members. However, in order to deny a seat to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members present.

- Eligibility for first chamber
- Eligibility for second chamber

- Immunity of legislators

- Extraordinary legislative sessions

Article 56

Business cannot be transacted in either House unless one-third or more of total membership is present.

All matters shall be decided, in each House, by a majority of those present, except as elsewhere provided in the Constitution, and in case of a tie, the presiding officer shall decide the issue.

Article 57

Deliberation in each House shall be public. However, a secret meeting may be held where a majority of two-thirds or more of those members present passes a resolution therefor.

Each House shall keep a record of proceedings. This record shall be published and given general circulation, excepting such parts of proceedings of secret session as may be deemed to require secrecy.

Upon demand of one-fifth or more of the members present, votes of the members on any matter shall be recorded in the minutes.

Article 58

Each House shall select its own president and other officials.

Each House shall establish its rules pertaining to meetings, proceedings and internal discipline, and may punish members for disorderly conduct. However, in order to expel a member, a majority of two-thirds or more of those members present must pass a resolution thereon.

Article 59

A bill becomes a law on passage by both Houses, except as otherwise provided by the Constitution.

A bill which is passed by the House of Representatives, and upon which the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, becomes a law when passed a second time by the House of Representatives by a majority of two-thirds or more of the members present.

The provision of the preceding paragraph does not preclude the House of Representatives from calling for the meeting of a joint committee of both Houses, provided for by law.

Failure by the House of Councillors to take final action within sixty (60) days after receipt of a bill passed by the House of Representatives, time in recess excepted, may be determined by the House of Representatives to constitute a rejection of the said bill by the House of Councillors.

Article 60

The budget must first be submitted to the House of Representatives.

- Joint meetings of legislative chambers

Upon consideration of the budget, when the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, and when no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or in the case of failure by the House of Councillors to take final action within thirty (30) days, the period of recess excluded, after the receipt of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House of Representatives shall be the decision of the Diet.

- Treaty ratification

Article 61

The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet approval required for the conclusion of treaties.

- Legislative oversight of the executive

Article 62

Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of records.

- Legislative oversight of the executive

Article 63

The Prime Minister and other Ministers of State may, at any time, appear in either House for the purpose of speaking on bills, regardless of whether they are members of the House or not. They must appear when their presence is required in order to give answers or explanations.

Article 64

- Supreme/ordinary court judge removal

The Diet shall set up an impeachment court from among the members of both Houses for the purpose of trying those judges against whom removal proceedings have been instituted.

Matters relating to impeachment shall be provided by law.

Chapter V: The Cabinet

- Establishment of cabinet/ministers

Article 65

Executive power shall be vested in the Cabinet.

- Establishment of cabinet/ministers

Article 66

The Cabinet shall consist of the Prime Minister, who shall be its head, and other Ministers of State, as provided for by law.

- Name/structure of executive(s)

The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians.

- Eligibility for cabinet
- Eligibility for head of government

The Cabinet, in the exercise of executive power, shall be collectively responsible to the Diet.

- Head of government selection

Article 67

The Prime Minister shall be designated from among the members of the Diet by a resolution of the Diet. This designation shall precede all other business.

- Joint meetings of legislative chambers

If the House of Representatives and the House of Councillors disagree and if no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or the House of Councillors fails to make designation within ten (10) days, exclusive of the period of recess, after the House of Representatives has made designation, the decision of the House of Representatives shall be the decision of the Diet.

Article 68

- Eligibility for cabinet
- Cabinet selection

The Prime Minister shall appoint the Ministers of State. However, a majority of their number must be chosen from among the members of the Diet.

- Cabinet removal

The Prime Minister may remove the Ministers of State as he chooses.

Article 69

- Cabinet removal
- Head of government removal

If the House of Representatives passes a non-confidence resolution, or rejects a confidence resolution, the Cabinet shall resign en masse, unless the House of Representatives is dissolved within ten (10) days.

Article 70

- Cabinet removal

When there is a vacancy in the post of Prime Minister, or upon the first convocation of the Diet after a general election of members of the House of Representatives, the Cabinet shall resign en masse.

Article 71

- Head of government replacement

In the cases mentioned in the two preceding articles, the Cabinet shall continue its functions until the time when a new Prime Minister is appointed.

Article 72

- Initiation of general legislation

The Prime Minister, representing the Cabinet, submits bills, reports on general national affairs and foreign relations to the Diet and exercises control and supervision over various administrative branches.

Article 73

- Powers of cabinet

The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions:

- Administer the law faithfully; conduct affairs of state.
- Manage foreign affairs.
- Conclude treaties. However, it shall obtain prior or, depending on circumstances, subsequent approval of the Diet.
- Administer the civil service, in accordance with standards established by law.
- Prepare the budget, and present it to the Diet.
- Enact cabinet orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal provisions in such cabinet orders unless authorized by such law.
- Decide on general amnesty, special amnesty, commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights.

- Foreign affairs representative

- Treaty ratification

- Budget bills

- Power to pardon

Article 74

All laws and cabinet orders shall be signed by the competent Minister of State and countersigned by the Prime Minister.

Article 75

The Ministers of State, during their tenure of office, shall not be subject to legal action without the consent of the Prime Minister. However, the right to take that action is not impaired hereby.

Chapter VI: Judiciary

Article 76

The whole judicial power is vested in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.

No extraordinary tribunal shall be established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.

All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only by this Constitution and the laws.

Article 77

The Supreme Court is vested with the rule-making power under which it determines the rules of procedure and of practice, and of matters relating to attorneys, the internal discipline of the courts and the administration of judicial affairs.

Public procurators shall be subject to the rule-making power of the Supreme Court.

The Supreme Court may delegate the power to make rules for inferior courts to such courts.

Article 78

Judges shall not be removed except by public impeachment unless judicially declared mentally or physically incompetent to perform official duties. No disciplinary action against judges shall be administered by any executive organ or agency.

Article 79

The Supreme Court shall consist of a Chief Judge and such number of judges as may be determined by law; all such judges excepting the Chief Judge shall be appointed by the Cabinet.

The appointment of the judges of the Supreme Court shall be reviewed by the people at the first general election of members of the House of Representatives following their appointment, and shall be reviewed again at the first general election of members of the House of Representatives after a lapse of ten (10) years, and in the same manner thereafter.

In cases mentioned in the foregoing paragraph, when the majority of the voters favors the dismissal of a judge, he shall be dismissed.

Matters pertaining to review shall be prescribed by law.

The judges of the Supreme Court shall be retired upon the attainment of the age as fixed by law.

All such judges shall receive, at regular stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office.

Article 80

The judges of the inferior courts shall be appointed by the Cabinet from a list of persons nominated by the Supreme Court. All such judges shall hold office for a term of ten (10) years with privilege of reappointment, provided that they shall be retired upon the attainment of the age as fixed by law.

The judges of the inferior courts shall receive, at regular stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office.

Article 81

The Supreme Court is the court of last resort with power to determine the constitutionality of any law, order, regulation or official act.

Article 82

Trials shall be conducted and judgment declared publicly.

Where a court unanimously determines publicity to be dangerous to public order or morals, a trial may be conducted privately, but trials of political offenses, offenses involving the press or cases wherein the rights of people as guaranteed in Chapter III of this Constitution are in question shall always be conducted publicly.

Chapter VII: Finance

Article 83

The power to administer national finances shall be exercised as the Diet shall determine.

Article 84

No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.

Article 85

No money shall be expended, nor shall the State obligate itself, except as authorized by the Diet.

Article 86

The Cabinet shall prepare and submit to the Diet for its consideration and decision a budget for each fiscal year.

Article 87

In order to provide for unforeseen deficiencies in the budget, a reserve fund may be authorized by the Diet to be expended upon the responsibility of the Cabinet. The Cabinet must get subsequent approval of the Diet for all payments from the reserve fund.

Article 88

All property of the Imperial Household shall belong to the State. All expenses of the Imperial Household shall be appropriated by the Diet in the budget.

Article 89

No public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit or maintenance of any religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent enterprises not under the control of public authority.

Article 90

Final accounts of the expenditures and revenues of the State shall be audited annually by a Board of Audit and submitted by the Cabinet to the Diet, together with the statement of audit, during the fiscal year immediately following the period covered. The organization and competency of the Board of Audit shall be determined by law.

Article 91

At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the state of national finances.

Chapter VIII: Local Self-Government

Article 92

Regulations concerning organization and operations of local public entities shall be fixed by law in accordance with the principle of local autonomy.

Article 93

The local public entities shall establish assemblies as their deliberative organs, in accordance with law.

The chief executive officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.

Article 94

Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.

Article 95

A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.

Chapter IX: Amendments

Article 96

Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds or more of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.

Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.

Chapter X: Supreme Law

Article 97

The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.

Article 98

This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.

The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.

Article 99

The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.

• Constitution amendment procedure

• Customary international law
• Legal status of treaties

• Duty to obey the constitution

Chapter XI: Supplementary Provisions

Article 100

This Constitution shall be enforced as from the day when the period of six months will have elapsed counting from the day of its promulgation.

The enactment of laws necessary for the enforcement of this Constitution, the election of members of the House of Councillors and the procedure for the convocation of the Diet and other preparatory procedures necessary for the enforcement of this Constitution may be executed before the day prescribed in the preceding paragraph.

Article 101

If the House of Councillors is not constituted before the effective date of this Constitution, the House of Representatives shall function as the Diet until such time as the House of Councillors shall be constituted.

Article 102

The term of office for half the members of the House of Councillors serving in the first term under this Constitution shall be three years. Members falling under this category shall be determined in accordance with law.

Article 103

The Ministers of State, members of the House of Representatives and judges in office on the effective date of this Constitution, and all other public officials who occupy positions corresponding to such positions as are recognized by this Constitution shall not forfeit their positions automatically on account of the enforcement of this Constitution unless otherwise specified by law. When, however, successors are elected or appointed under the provisions of this Constitution, they shall forfeit their positions as a matter of course.

Topic index

B

Budget bills 11, 13, 15

C

Cabinet removal 13

Cabinet selection 13

Claim of universal suffrage 5

Compulsory education 7

Constitution amendment procedure 17

Constitutional interpretation 15

Customary international law 17

D

Dismissal of the legislature 4

Division of labor between chambers 11

Duty to obey the constitution 5, 17

Duty to pay taxes 7

Duty to work 7

E

Electoral districts 9

Eligibility for cabinet 12, 13

Eligibility for first chamber 9, 10

Eligibility for head of government 12

Eligibility for second chamber 9, 10

Equality regardless of creed or belief 5

Equality regardless of gender 5

Equality regardless of origin 5

Equality regardless of race 5

Equality regardless of social status 5

Establishment of cabinet/ministers 12

Extraordinary legislative sessions 10

F

First chamber selection 9

Foreign affairs representative 13

Free education 7

Freedom of assembly 6

Freedom of association 6

Freedom of expression 6

Freedom of movement 6

Freedom of opinion/thought/conscience 6

Freedom of press	6
Freedom of religion	6
G	
General guarantee of equality	5
H	
Head of government removal	13
Head of government replacement	13
Head of government selection	4, 12
Head of state powers	4
Head of state selection	3
Human dignity	7
I	
Immunity of legislators	10
Inalienable rights	5, 6, 7
Initiation of general legislation	13
J	
Joint meetings of legislative chambers	11, 12, 13
Judicial independence	14
L	
Leader of first chamber	11
Leader of second chamber	11
Legal status of treaties	17
Legislative oversight of the executive	12, 16
Limits on employment of children	7
M	
Mandatory retirement age for judges	15
Motives for writing constitution	3
Municipal government	16
N	
Name/structure of executive(s)	3, 12
O	
Ordinary court selection	15
P	
Power to pardon	13
Powers of cabinet	13
Principle of no punishment without law	9
Prohibition of capital punishment	7

Prohibition of cruel treatment	8
Prohibition of double jeopardy	9
Prohibition of slavery	6
Prohibition of torture	8
Protection from ex post facto laws	9
Protection from expropriation	7
Protection from false imprisonment	9
Protection from self-incrimination	8
Protection from unjustified restraint	8
Protection of judges' salaries	15
Provision for matrimonial equality	7
Public or private sessions	11
Publication of deliberations	11
 Q	
Quorum for legislative sessions	11
 R	
Regulation of evidence collection	8
Removal of individual legislators	11
Requirements for birthright citizenship	5
Right of petition	6
Right to academic freedom	6
Right to choose occupation	6
Right to counsel	8
Right to examine evidence/ witnesses	8
Right to fair trial	8
Right to health care	7
Right to join trade unions	7
Right to life	5,7
Right to own property	7
Right to public trial	8
Right to reasonable standard of living	7
Right to renounce citizenship	6
Right to speedy trial	8
Right to work	7
Rights of children	7
 S	
Second chamber selection	9
Secret ballot	5
Separation of church and state	6
Size of first chamber	9
Size of second chamber	9

Source of constitutional authority 3
Structure of legislative chamber(s) 9
Structure of the courts 14
Supreme court selection 4, 14
Supreme court term length 14
Supreme/ordinary court judge removal 12, 14

T

Term length for first chamber 9
Term length of second chamber 9
Treaty ratification 12, 13

